MANAJEMEN RISIKO

TAHUN 2023

Surat Keputusan Inspektur Jenderal No.ITJ-03.OT.02.01 Tanggal 24 Januari 2023

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan,
Jakarta Selatan 12940, P.O. Box 3489, Telepon/Faksimili 021-5252975
Laman: http://www.itjen.kemenkumham.go.id, Email: itjen@kemenkumham.go.id

Nomor	:	ITJ.1.UM.01.01- 307	3 Februari 2023
Sifat	:	Penting	
Lampiran	:	1 (satu) Berkas	
Hal	:	Dokumen Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal Th.2023	

Yth.
Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM
di
tempat

Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, bahwa setiap Satuan Kerja termasuk Inspektorat Jenderal sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) berkewajiban menyusun penerapan Manajemen Risiko. Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan Dokumen Penerapan Manajemen Risiko pada UPR Unit Inspektorat Jenderal tahun 2023 meliputi :

a. Surat Keputusan Inspektur Jenderal tentang Unit Pemilik Risiko dan Tim Penyusun Manajemen Rsiiko Inspektorat Jenderal Tahun 2023
b. Piagam Manajemen Risiko Th.2023
c. Daftar Risiko meliputi Penetapan Tujuan, identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Penanganan Risiko dan Form Pemantauan Risiko

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal

#KUMHAMPASTI
Ditandatangani secara elektronik oleh :

Yayah Mariani, SH.MH.
NIP 196403111994032007

Tembusan :
1. Sekretaris Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
INSPEKTORAT JENDERAL

NOMOR : ITJ.1.UM.01.01-306

Yth :1. Inspektur Jenderal
2. Para Inspektur Wilayah
3. Para Kepala Bagian
4. Koordinator kelompok Subatansi
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Sifat : Penting
Hal : Dokumen Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal Th.2023
Tanggal : 4 Februari 2023

Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, bahwa setiap Satuan Kerja termasuk Inspektorat Jenderal sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) berkewajiban menyusun penerapan Manajemen Risiko. Berkenaan dengan hal tersebut telah dilaksanakan kegiatan *Risk Culture Awareness* dalam rangka Penyusunan Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal Th.2023 pada tanggal 25 sd 27 Januari 2023..

Merujuk hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Inspektorat Jenderal tahun 2023 meliputi :

a. Piagam Manajemen Risiko
b. Susunan Tim Unit Pemilik Risiko Inspektorat Jenderal
c. Susunan Tim Penyusun Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal
d. Daftar Risiko (Penetapan Tujuan, identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Penanganan Risiko dan Form Pemantauan Risiko), hasil pembahasan bersama dengan jajaran perwakilan Inspektorat Wilayah dan Sekretariat Inspektorat Jenderal tanggal 24 sd 27 Januari 2022 di BUTTMKP Bekasi serta masukan/saran/perbaikan/koreksi dari para Inspektur Wilayah, Kepala Bagian dan Kelompok Substansi.

Dokumen Manajemen Risiko ini menjadi bahan untuk pemantauan berkala atas Rencana Aksi Penanganan Risiko yang telah disusun

Demikian disampaikan atas perkenan Bapak Inspektur Jenderal dan Bapak/Ibu para Inspektur Wilayah, Kepala Bagian serta Koordinator Kelompok Substansi, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Yayah Mariani, SH.MH.

NIP 196403111994032007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2023
NOMOR : ITJ-03.OT.02.01 TAHUN 2023 TANGGAL 24 JANUARI 2023

Dalam rangka pencapaian sasaran unit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Saya menyatakan:

1. **Piagam Manajemen Risiko merupakan hasil penuangan pelaksanaan proses Manajemen Risiko yang meliputi Penetapan Tujuan, Profil dan Peta Risiko serta Rencana Penanganan Risiko (Terlampir);**
2. **Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh koordinator risiko dan sesuai ketentuan terkait Penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;**
3. **Rencana penanganan risiko yang dituangkan dalam Piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin;**
4. **Untuk meningkatkan efektifitas penerapan Manajemen Risiko, akan dilakukan pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.**

Sekretaris Inspektorat Jenderal,

Yayah Mariani
NIP 196403111994032007

Inspektur Wilayah I,

Icon Siregar
NIP 196304171983031001

Inspektur Wilayah II,

Lilik Sujandi
NIP 197110171995031001

Inspektur Wilayah III,

Iwan Santoso
NIP 197004301991031001

Inspektur Wilayah IV,

Bambang Setyabudi
NIP 196911281997031001

Inspektur Wilayah V,

Marasidin
NIP 196404251990011001

Inspektur Wilayah VI,

Luluk Ratnaningtyas
NIP 196310011991032001

Inspektur Jenderal,

Razilu
NIP 196511281991031002

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR: ITJ-03.OT.02.01 TAHUN 2023

TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
PADA UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2023

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Menimbang : a. bahwa Inspektorat Jenderal sebagai pemilik risiko utama berkewajiban menyusun penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko (UPR) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/DS/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 596) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1652);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen

Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 399);

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko (UPR) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan apabila terdapat perubahan sasaran, tujuan, maupun Indikator Kinerja, untuk segera dilakukan penyesuaian.

KEDUA : Menunjuk Pejabat sebagai Unit Pemilik Risiko Unit Utama (UPR) Inspektorat Jenderal sebagaimana tercantum dalam lampiran-II dan menunjuk Pejabat/Pegawai sebagai Tim Penyusun/Pembahas Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal sebagaimana tercantum dalam lampiran-III Keputusan ini serta menetapkan Rencana Kerja Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran-IV Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat yang ditunjuk sebagai Unit Pemilik Risiko Unit Utama (UPR) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas:

1. Menyusun Piagam Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal sebagaimana tercantum dalam lampiran-I Keputusan ini;
2. Menyusun strategi penerapan Manajemen Risiko di Unit Utama;
3. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Manajemen Risiko di Unit Utama;
4. Melakukan Identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada unit pemilik risiko masing-masing;
5. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
6. Menatausahakan proses Manajemen Risiko.

KEEMPAT : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Tim Penyusun/ Pembahas/Pemantau Manajemen Risiko mempunyai tugas membantu Tim Unit Pemilik Risiko dalam proses:

1. Penetapan Tujuan berdasarkan pada Program, Sasaran, Indikator pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas fungsi dan capaian kinerja;
2. Penilaian/Asesmen Risiko meliputi:
   a. Identifikasi Risiko dengan menetapkan pernyataan risiko, kriteria risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, dampak risiko dan pengendalian risiko. Untuk kemudian hasil identifikasi berupa Daftar Risiko;
   b. Analisis Risiko dengan menetapkan tingkat kemungkinan, tingkat dampak, tingkat risiko, dan profil risiko. Untuk kemudian hasil analisis risiko berupa Peta Risiko;
   c. Evaluasi risiko dengan menetapkan prioritas risiko, toleransi risiko, indikator risiko, dan batas aman risiko;
   d. Penanganan/*Treatment* Risiko dengan menetapkan opsi penanganan risiko, kegiatan pengendalian risiko, jadwal penanganan risiko dan penanggung jawab penanganan risiko serta cadangan risiko bila ada;
   e. Pemantauan atas penanganan risiko minimal per semester dalam satu tahun anggaran bersama dengan

Pejabat yang tergabung dalam Unit Pemilik risiko Inspektorat Jenderal;

3. Menyusun Laporan Pemantauan Risiko minimal per semester paling lambat tanggal 10 semester berikutnya, untuk mengetahui tren risiko selama satu tahun berjalan dan menyampaikan kepada Inspektur Jenderal serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Membantu Unit Pemilik Risiko saat dilakukan evaluasi Maturitas SPIP Terintegrasi dan Evaluasi Maturitas Manajemen Risiko oleh APIP Inspektorat Wilayah I, dalam hal menyediakan data dukung serta pembahasan bersama dengan APIP.
5. Melakukan proses komunikasi dan konsultasi dalam setiap tahap proses manajemen risiko.

KELIMA : Rencana Kerja Unit pemilik risiko dan Tim Penyusun/Pembahas/Pemantau Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran-III Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2023

Inspektur Jenderal,

#KUMHAMPASTI
Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAZILU
NIP 196511281991031002

Tembusan :
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lampiran I Keputusan Inspektur Jenderal
Nomor : ITJ-03.OT.02.01 TAHUN 2023
Tanggal : 24 Januari 2023

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2023
NOMOR : ITJ-03.OT.02.01 TAHUN 2023 TANGGAL 24 JANUARI 2023

Dalam rangka pencapaian sasaran unit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Saya menyatakan:

1. **Piagam Manajemen Risiko merupakan hasil penuangan pelaksanaan proses Manajemen Risiko yang meliputi Penetapan Tujuan, Profil dan Peta Risiko serta Rencana Penanganan Risiko (Terlampir);**
2. **Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh koordinator risiko dan sesuai ketentuan terkait Penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;**
3. **Rencana penanganan risiko yang dituangkan dalam Piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin;**
4. **Untuk meningkatkan efektifitas penerapan Manajemen Risiko, akan dilakukan pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.**

Sekretaris Inspektorat Jenderal,

Yayah Mariani
NIP 196403111994032007

Inspektur Wilayah I,

Icon Siregar
NIP 196304171983031001

Inspektur Wilayah II,

Lilik Sujandi
NIP 197110171995031001

Inspektur Wilayah III,

Iwan Santoso
NIP 19700430199103100l

Inspektur Wilayah IV,

Bambang Setyabudi
NIP 196911281997031001

Inspektur Wilayah V,

Marasidin
NIP 196404251990011001

Inspektur Wilayah VI,

Luluk Ratnaningtyas
NIP 196310011991032001

Inspektur Jenderal,

Razilu
NIP 196511281991031002

Lampiran-II Keputusan Inspektur Jenderal
Nomor : ITJ-03.OT.02.01 TAHUN 2023
Tanggal : 24 Januari 2023

UNIT PEMILIK RISIKO UNIT UTAMA (UPR) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NO	PEJABAT	JABATAN DALAM TIM
1.	Inspektur Jenderal	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Ketua merangkap Anggota
3.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Inspektur Wilayah I	Anggota
5.	Inspektur Wilayah II	Anggota
6.	Inspektur Wilayah III	Anggota
7.	Inspektur Wilayah IV	Anggota
8.	Inspektur Wilayah V	Anggota
9.	Inspektur Wilayah VI	Anggota

Inspektur Jenderal,

#KUMHAMPASTI
Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAZILU
NIP 196511281991031002

Lampiran-III Keputusan Inspektur Jenderal
Nomor : ITJ-03.OT.02.01 TAHUN 2023
Tanggal : 24 Januari 2023

TIM PENYUSUN/PEMBAHAS/PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO UNIT PEMILIK RISIKO UTAMA (UPR) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Yayah Mariani Sekretaris Inspektorat Jenderal	Ketua
2.	Budi Auditor Ahli Utama	Pengarah
3.	Nanih Kusnani Kepala Bagian Program dan Pelaporan	Sekretaris I
4.	Tri Sayekti Ningsih Perencana Ahli Muda	Sekretaris II
5.	Tiarma Rosa Sinaga Auditor Madya Inspektorat Wilayah I	Anggota
6.	Tessa Leo Marlino Auditor Muda Inspektorat Wilayah I	Anggota
7.	Chandra Julius Foster M Auditor Pertama Inspektorat Wilayah I	Anggota
8.	Rini Yuniasih Auditor Penyelia Inspektorat Wilayah I	Anggota
9.	Qolbin Salim Auditor Madya Inspektorat Wilayah II	Anggota
10.	M. H. Kesuma Negara Auditor Madya Inspektorat Wilayah II	Anggota
11.	Agus Priyo Atmoko Auditor Muda Inspektorat Wilayah II	Anggota
12.	Arman Syah Razak Auditor Muda Inspektorat Wilayah II	Anggota
13.	Maddalena Saragi Auditor Madya Inspektorat Wilayah III	Anggota
14.	Zaifachatur Roziyah Auditor Muda Inspektorat Wilayah III	Anggota
15.	Elychia Roly Putri Auditor Pertama Inspektorat Wilayah III	Anggota
16.	Latiefah Kusumawati Auditor Pertama Inspektorat Wilayah III	Anggota
17.	Ichsanudin Eko Saputro Auditor Madya Inspektorat Wilayah IV	Anggota

18.	Bosar Immanuel Auditor Pertama Inspektorat Wilayah IV	Anggota
19.	Surya Narendra Auditor Pertama Inspektorat Wilayah IV	Anggota
20.	Suciati Kristiasari Auditor Pertama Inspektorat Wilayah IV	Anggota
21.	Retna Wandita Auditor Muda Inspektorat Wilayah V	Anggota
22.	Fransiska Sri A. Tarigan Auditor Pertama Inspektorat Wilayah V	Anggota
23.	Edy Prabowo Saputro Auditor Muda Inspektorat Wilayah VI	Anggota
24.	Dewi Ayu Nurmalasari Auditor Muda Inspektorat Wilayah VI	Anggota
25.	Firman Septa Firdaus Auditor Pertama Inspektorat Wilayah VI	Anggota
26.	Hendra Anggara Saputra Auditor Pertama Inspektorat Wilayah VI	Anggota
27.	Eem Nurmanah Analis Kepegawaian Ahli Madya	Anggota
28.	Andi Muhammad Taufik Kepala Subbagian Rumah Tangga	Anggota
29.	Baneriama Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
30.	Dian Saptawati Arsiparis Ahli Muda	Anggota
31.	Een Setia Suharjito Analis Anggaran Ahli Muda	Anggota
32.	Triana Novita Sari Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
33.	Lucky Anggara Pelaksana pada Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
34.	Bobby Novianto Pelaksana pada Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
35.	Ivan Satria Pelaksana pada Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
36.	Erviana Rahayu Pelaksana pada Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
37.	Adhi Herlambang Analis Anggaran Ahli Pertama	Anggota
38.	Ida Bagus Mahayoga Raharja Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
39.	Prisi Khairani Arief Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota

40.	Simon Halomoan Pelaksana pada Kelompok Substansi Humas dan SIP	Anggota
41.	Anggit Sri Rahayu Pelaksana pada Kelompok Substansi Humas dan SIP	Anggota
42.	Siti Fatimah Pelaksana pada Kelompok Substansi Keuangan	Anggota
43.	Reynaldi Effendi Putra Pelaksana pada Kelompok Substansi Keuangan	Anggota
44.	Iiis Siti Aisyah Pelaksana pada Kelompok Substansi Keuangan	Anggota
45.	Andi Trias Aryanto Pelaksana pada Bagian Umum	Anggota
46.	Robi Rolis Saputra Pelaksana pada Bagian Umum	Anggota
47.	Lia Aulia Siringo-Ringo Pelaksana pada Bagian Umum	Anggota
48.	Sherly Mercella Septiyana Analis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota
49.	Apriliya Wulandari Analis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota
50.	Seprinaldo Pelaksana pada Kelompok Substansi Kepegawaian	Anggota
51.	Seprinaldo Pelaksana pada Kelompok Substansi Kepegawaian	Anggota

Ket : Susunan Tim Penyusun adalah seluruh peserta kegiatan Risk Cultr Awareness penyusunan Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal tahun 2023 di BUTTMKP Bekasi tanggal 24 sd 27 Januari 2023

Inspektur Jenderal,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAZILU
NIP 196511281991031002

Lampiran-IV Keputusan Inspektur Jenderal
Nomor : ITJ-03.OT.02.01 TAHUN 2023
Tanggal : 24 Januari 2023

RENCANA KERJA UNIT PEMILIK RISIKO (UPR)

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

TAHUN 2023

NO	KEGIATAN	BULAN												OUTPUT
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Analisa Hasil Pemantauan Manajemen Risiko Semester II Tahun 2022													Laporan Pemantauan Risiko Semester II Tahun 2022
2.	Pembahasan pertama konsep Manajemen Risiko ITJEN													Konsep Manajemen Risiko Tahun 2023
3.	Penyusunan Surat Keputusan IRJEN tentang UPR dan Tim Penyusun/Pembahas/Pemantau Manajemen Risiko ITJEN													SK UPR dan Tim Penyusun Manajemen Risiko Tahun 2023
4.	Penyampaian Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Inspektur Wilayah, Kepala Bagian, Koordinator Kelompok Substansi, dan Subkoordinator hal masukan/saran atas konsep Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal Tahun 2023 hasil pembahasan pertama													Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal hal Permohonan Masukan atas Konsep Manajemen Risiko
5.	Perbaikan konsep Manajemen Risiko berdasarkan masukan/saran													Konsep Manajemen Risiko Tahun 2023
6.	Penetapan Piagam Manajemen Risiko													IRJEN
7.	Penetapan Penerapan Manajemen Risiko													IRJEN
8.	Pelaksanaan Manajemen Risiko serta proses Konsultasi dan komunikasi selama satu tahun anggaran													Seluruh pegawai
9.	Pembahasan Pemantauan Risiko Semester I													Tim
10.	Pengumpulan data dukung hasil Pemantauan Manajemen Risiko Semester I													Tim
11.	Penyusunan Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Semester I													Sekretaris UPR
12.	Pembahasan Pemantauan Risiko Semester II													Tim

13.	Pengumpulan data dukung hasil Pemantauan Manajemen Risiko Semester II												Tim
14.	Penyusunan Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Semester II												Sekretaris UPR
15.	Menghadiri dan menyediakan data dukung evaluasi SPIP terintegrasi												Tim
16.	Menghadiri dan menyediakan data dukung evaluasi Maturitas Manajemen Risiko												Tim
17.	Tindak lanjut hasil evaluasi												Tim

Inspektur Jenderal,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAZILU
NIP 196511281991031002

TAHAP-1
PENETAPAN TUJUAN / KONTEK MANAJEMEN RISIKO

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal
Nomor ITJ-03.OT.02.01 TAHUN 2023
Tanggal 24 Januari 2023

Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Inspektorat Jenderal

PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko **: Inspektorat Jenderal**

Periode Penerapan **: 2023**

Hasil bahas di BUTTMKP bekasi dan Masukan Itwil/Sekret Itjen

No	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Program Dukungan Manajemen Unit ITJEN	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham (WTP=Wajar Tanpa Pengecualian)	Tindaklanjut temuan belum otimal
2	Program Dukungan Manajemen Unit ITJEN	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham (WTP=Wajar Tanpa Pengecualian)	Pengelolaan BMN yang belum optimal
3	Program Dukungan Manajemen Unit ITJEN	Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dilingkungan KEMENKUMHAM	Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham (Level 3 "Terdefinisi")	Penilaian risiko kegiatan dan aktifitas pengendalian belum substantif
4	Program Dukungan Manajemen Unit ITJEN	Meningkatnya efektfitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi KEMENKUMHAM	Persentase Satuan Kerja Yang Nilai AKIP minimal "BB (dari jumlah yang dilakukan evaluasi AKIP oleh ITJEN)	Pemenuhan data dukung belum memadai
5	Program Dukungan Manajemen Unit ITJEN	Meningkatnya efektfitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi KEMENKUMHAM	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90 (dari jumlah yang dilakukan evaluasi PMPRB oleh ITJEN)	Pemenuhan data dukung belum memadai
6	Program Dukungan Manajemen Unit ITJEN	Meningkatnya efektfitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi KEMENKUMHAM	Persentase Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM (dari jumlah yang dilakukan evaluasi WBK/WBBM oleh Tim TPI ITJEN)	Pemenuhan data dukung belum memadai dan tidak memenuhi kriteria nilai minimal dalam pembanguanan ZI menuju WBK dan WBBM
7	Program Dukungan Manajemen Unit ITJEN	Meningkatnya efektfitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi KEMENKUMHAM	Indeks Persepsi Integritas KEMENKUMHAM (80.2)	Masih terdapat Pejabat/pegawai di lingkungan Kemenkumham yang melakukan gratifikasi, suap, pungutan liar dan korupsi
8	Program Dukungan Manajemen Unit ITJEN	Meningkatnya efektfitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi KEMENKUMHAM	0 (Nol) kasus penyuapan yang terbukti di seluruh Itjen Kemenkumham	Belum seluruh proses kegiatan pada Itjen telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyuapan beserta mitigasinya yang tepat

No	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
9	Program Dukungan Manajemen Unit ITJEN	Meningkatnya efektfitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi KEMENKUMHAM	Sertifikasi ISO 37001:2016 di lingkungan Itjen	Pemenuhan data dukung belum memadai
10	Program Dukungan Manajemen Unit ITJEN	Meningkatnya efektfitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi KEMENKUMHAM	Pencegahan dan penanganan Bencana	Prosedur pencegahan dan penanganan bencana belum dipahami oleh seluruh pegawai
11	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Terimplementasinya kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi / pungutan liar	Indeks Persepsi Integritas KEMENKUMHAM	Hasil survei Persepsi Integritas dari KPK belum mencerminkan tingkat integritas Kemenkumham
12	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Optimalkan Efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Indeks RB ITJEN	Pelaksanan RB ITJEN belum terdokumentasi dengan baik
13	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Optimalkan Efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Indeks RB ITJEN	Pendokumentasian Pelaksanaan implementasi SPIP belum optimal di laksanakan
14	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Optimalkan Efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Indeks RB ITJEN	Manajemen Risiko ITJEN hanya sebagai pemenuhan dokumen
15	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Optimalkan Efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Indeks RB ITJEN	Efektifitas kerjasama belum optimal
16	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Optimalkan Efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Nilai SAKIP ITJEN "Baik"	Belum optimal nya penerapan penghargaan dan sanki berdasarkan capaian indikator kinerja individu
17	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat yang berkualitas, berintegritas dan profesional	Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	Belum terpenuhinya kompetensi bagi selururh SDM ITJEN
18	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat yang berkualitas, berintegritas dan profesional	Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	Layanan kepegawaian belum optimal
19	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat yang berkualitas, berintegritas dan profesional	Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham (Tingkat 4)	Tata nilai Kemenkumham belum optimal ditanamkan pada setiap ASN
20	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Mengembangkan kualitas Sistem Informasi dilingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Pengawasan belum Optimal

No	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
21	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel	Perentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel	Manajemen aset yang belum optimal
22	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel	Perentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel	Keterlambatan pemrosesan surat masuk melalui SISUMAKER
23	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel	Perentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel	Kurangnya informasi tentang data arsip aktif dan in aktif
24	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel	Perentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel	Inventarisasi BMN tidak update
25	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel	Perentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel	Pemeliharaan dan operasional kantor kurang optimal
26	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel	Perentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di tahun berjalan
27	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan Akuntabel	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel (WTP)	Terdapat realisasi belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan
28	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan Akuntabel	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel (WTP)	Data realisasi penyerapan anggaran yang disajikan kurang akurat/perbedaan data realisasi anggaran antara Bagian Keuangan dengan Bagian lain dan ITWIL
29	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan Akuntabel	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel (WTP)	Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Itjen

No	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
30	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan Akuntabel	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel (WTP)	Data SAIBA dan BMN tidak sinkron
31	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan Akuntabel	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel (WTP)	Pembayaran tagihan pihak ketiga/penyedia belum tepat waktu
32	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan Akuntabel	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel (WTP)	Salah saji dalam menyusun laporan realisasi belanja pegawai
33	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan Akuntabel	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel (WTP)	Masih terdapat Bendahara belum memiliki kompetensi yang memadai
34	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan Akuntabel	Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal (88%)	UP (uang persediaan) tidak cukup tersedia sesuai dengan kebutuhan dalam RAB dan KAK pelaksanaan kegiatan
35	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan Akuntabel	Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal (88%)	Masih terdapat dokumen pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban yang lengkap dan benar
36	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Optimalkan Efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	0 (nol) kasus penyuapan yang terbukti dalam memfasilitasi peningkatan nilai RB, nilai SAKIP, nilai maturitas SPIP ITJEN	Kurang optimalnya peran POKJA Tim RB, SAKIP dan SPIP ITJEN yang telah ditetapkan
37	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Optimalkan Efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	0 (nol) kasus penyuapan yang terbukti dalam memberikan anggaran per jenis belanja dan per kegiatan per ITWIL dan Bagian	Pagu belanja non operasional masih dalam bentuk total bukan per kegiatan
38	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat yang berkualitas, berintegritas dan profesional (LG-2)	0 (nol) kasus penyuapan yang terbukti dalam memfasilitasi pengelolaan kepegawaian ITJEN (mutasi,promosi,kenaikan pangkat dan pengelolaan umum kepegawaian lainnya)	Terdapat keterlambatan dalam memberikan layanan kepegawaian

No	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
39	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel	0 (nol) kasus penyuapan yang terbukti dalam pengadaan barang/jasa	Panitia / Pokja pengadaan belum optimal memahami proses pengadaan
40	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan Akuntabel	0 (nol) kasus penyuapan yang terbukti dalam memfasilitasi layanan keuangan	Terjadinya benturan kepentingan dalam pecepatan pemberian anggaran kegiatan
41	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Andal dan Responsif	0 (nol) kasus penyuapan yang terbukti dalam memfasilitasi layanan Teknologi Informasi	Belum memiliki grand design Teknologi Informasi Pengawasan
42	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Andal dan Responsif	0 (nol) kasus penyuapan yang terbukti dalam mengelola database temuan Pengawasan dan Pemeriksaan	Perbedaan data temuan
43	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Andal dan Responsif	0 (nol) kasus penyuapan yang terbukti dalam mengelola database Hukuman Disiplin pegawai	Adanya benturan kepentingan dalam proses pemberian surat keterangan catatan cela
44	Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya ITJEN	Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Andal dan Responsif	0 (nol) kasus penyuapan yang terbukti dalam memfasilitasi layanan pengelolaan pengaduan, wbs dan gratifikasi	Layanan SIPIDU belum optimal
45	Kegiatan Pengawasan Inspektorat Wilayah	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham (level 3 menuju 4)	IACM/KAPIP level 4 belum tercapai
	Kegiatan Pengawasan Inspektorat Wilayah	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham (level 3 menuju 4)	PKPT berbasis risiko belum diterapkan secara optimal sesuai Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR)
46	Kegiatan Pengawasan Inspektorat Wilayah	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja	Belum seluruh satuan kerja menyusun Manajemen Risiko
47	Kegiatan Pengawasan Inspektorat Wilayah	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase pemanfaatan penerapan manejemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja	Terjadinya fraud ataupun Operasi Tangkap tangan

No	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
48	Kegiatan Pengawasan Inspektorat Wilayah	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara/ pengembalian ke kas negara dan terkait administrasi	Kurangnya respon satuan kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP terkait temuan pengembalian ke kas negara dan temuan administrasi
49	Kegiatan Pengawasan Inspektorat Wilayah	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara dan terkait Administrasi	Kurangnya respon satuan kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terkait temuan Kerugian negara dan administrasi
50	Kegiatan Pengawasan Inspektorat Wilayah	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Presentase satuan kerja dilingkungan ITWIL I, II, III, Iv, V dan VI yang memperoleh predikat WBK/WBBM	Pemenuhan data dukung komponen pengungkit dan survei komponen hasil belum memadai
51	Kegiatan Pengawasan Inspektorat Wilayah	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	0 (Nol) kasus penyuapan yang terbukti di seluruh Itjen Kemenkumham	Belum seluruh proses kegiatan pada ITWIL telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyuapan beserta mitigasinya yang tepat
				Hasil bahas di BUTTMKP bekasi dan Masukan Itwil/Sekret Itjen

TAHAP-2
IDENTIFIKASI RISIKO
(DAFTAR RISKO/ RISK UNIVERSE)

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal
Nomor ITJ-03.OT.02.01 TAHUN 2023
Tanggal 24 Januari 2023
Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Inspektorat Jenderal

DAFTAR RISIKO (RISK UNIVERSE)

Unit Pemilik Risiko : Inspektorat Jenderal
Periode Penerapan : Tahun2023

Konsep hasil bahas di BUTTMKP bekasi dan masukan Itwil/Sekret Itjen

Risk Event	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Krireria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
1	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham (WTP=Wajar Tanpa Pengecualian)	Tindaklanjut temuan belum otimal	Bertambahnya temuan BPK yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti Kemenkuham	Risiko Operasional	ITJEN	Temuan pihak ketiga yang sulit ditindaklanjuti	Internal dan ekternal	C dan UC	Adanya kerugian negara dan ketidakpercayaan publik atas pengelolaan laporan keuangan Kemenkumham	Kemen kumham	-Pemantauan temuan BPK - Rekon data temuan APIP dengan Satker - reviu RKBMN, reviu RKAKL, reviu LK, dan pendampingan penyusunan LK	Bertambahnya temuan BPK yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti Kemenkuham
2	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham (WTP=Wajar Tanpa Pengecualian)	Pengelolaan BMN yang belum optimal	Penguasaan BMN Kementerian Hukum dan HAM oleh pihak ketiga	Risiko Keuangan	ITJEN	Lemahnya penegakan aturan	Internal dan ekternal	C dan UC	Terdapat BMN yang belum dapat dimanfaatkan	Kemen kumham	Monitoring BMN	Penguasaan BMN Kementerian Hukum dan HAM oleh pihak ketiga
3	Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham (Level 3 "Terdefinisi")	Penilaian risiko kegiatan dan aktifitas pengendalian belum substantif	Indeks SPIP terintegrasi level 4 Kemenkumham sulit diperoleh	Risiko Operasional	ITJEN	Belum melaksanakan evaluasi terpisah	Internal	C	Belum seluruh satker dapat menerapkan SPIP Terintegrasi sesuai Perka BPKP No.5 th.2021 tentang SPIP Terintegrasi	Kemen kumham	Evaluasi maturitas SPIP oleh Itwil I, workshop SPIP, penyusunan Perenarapan manajemen risiko	Indeks SPIP terintegrasi level 4 Kemenkumham sulit diperoleh
4	Persentase Satuan Kerja Yang Nilai AKIP minimal "BB (dari jumlah yang dilakukan evaluasi AKIP oleh ITJEN)	Pemenuhan data dukung belum memadai	Tingkat Akuntabilitas Kinerja belum mencapai Nilai minimal "BB"	Risiko Operasional	ITJEN	Pengukuran Kinerja belum terintegrasi (belum diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Intrenal	C	Ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kemenkumham	Kemen kumham	Evaluasi SAKIP, Reviu LAKP Kementerian, Workshop SAKIP	Tingkat Akuntabilitas Kinerja belum mencapai Nilai minimal "BB"
5	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90 (dari jumlah yang dilakukan evaluasi PMPRB oleh ITJEN)	Pemenuhan data dukung belum memadai	Nilai capaian RB belum mencapai Nilai minimal 35,5	Risiko Operasional	ITJEN	Hasil dari penilaian FAKTOR HASIL, niainya masih rendah	Internal dan Ekternal	C	Ketidakpercayaan publik terhadapimplementasi reformasi birokrasi Kemenkumham	Kemen kumham	Evaluasi PMPRB, workshop PMPRB	Nilai capaian RB belum mencapai Nilai minimal 35,5

Risk Event	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Krireria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
6	Persentase Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM (dari jumlah yang dilakukan evaluasi WBK/WBBM oleh Tim TPI ITJEN)	Pemenuhan data dukung belum memadai dan tidak memenuhi kriteria nilai minimal dalam pembanguanan ZI menuju WBK dan WBBM	Satuan Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM tidak sesuai dengan Target yang ditetapkan	Risiko reputasi	ITJEN	perbedaan persepsi pemenuhan data dukung antara Satuan Kerja, TPI dan TPN, khususnya terkait dengan Inovasi, Manajemen Media, Manajemen Resiko dan Indikator Kinerja yang berorientasi hasil belum memadai serta persepsi masyarakat terhadap IPK dan IKM pada satuan kerja masih rendah	Internal dan Ekternal	C	-Kemenkumham kurang optimal membangun Zona Integritas - kerja yang diusulkan oleh TPI kepada TPN tidak seluruhnya memenuhi kriteria untuk mendapatkan Predikat WBK dan WBBM	Kemen kumham	Melakukan pendampingan, Sosialisasi dan Workshop Pembangunan ZI	Satuan Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM tidak sesuai dengan Target yang ditetapkan
7	Indeks Persepsi Integritas KEMENKUMHAM (80.2)	Masih terdapat Pejabat/pegawai di lingkungan Kemenkumham yang melakukan gratifikasi, suap, pungutan liar dan korupsi	Nilai Indeks Persepsi Integritas KEMENKUMHAM belum mencapai 80.2	Risiko reputasi	ITJEN	Belum meratanya tingkat integritas Pejabat/pegawai di lingkungan Kemenkumham.	Internal dan Ekternal	UC	Munculnya pemberitaan negatif Kemenkumham yang mempengaruhi penurunan Indeks Persepsi Integritas.	Kemen kumham	-arahan pimpinan terkait integritas -ditetapkannya para agen perubahan - reviu tunas integritritas	Nilai Indeks Persepsi Integritas KEMENKUMHAM belum mencapai 80.2
8	0 (Nol) kasus penyuapan yang terbukti di seluruh Itjen Kemenkumham	Belum seluruh proses kegiatan pada Itjen telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyuapan beserta mitigasinya yang tepat	perencanaan kegiatan audit yang tidak sesuai dengan standar	Risiko Kepatuhan	ITJEN	-Terdapatnya conflict of interest/penyuapan pada saat perencanaan kegiatan audit '-Terdapatnya conflict of interest/penyuapan pada proses pelaksanaan kegiatan audit -Adanya dorongan untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari manipulasi laporan audit	Internal dan Eksternal	C dan UC	-Hasil audit yang tidak obyektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan -Penurunan Kredibilitas Itjen	Kemen kumham	-Penyusunan PKPT berdasar faktor risiko -reviu RKAKL oleh ITWIL I -Audit investigasi dari inspektorat wilayah I -.Adanya layanan UPG (unit pengendalian gratifikasi) -.Adanya UPP (unit pemberantasan pungutan liar) - Adanya Layanan WBS	Potensi perencaan kegiatan audit yang tidak sesuai dengan standar
9	0 (Nol) kasus penyuapan yang terbukti di seluruh Itjen Kemenkumham	Belum seluruh proses kegiatan pada Itjen telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyuapan beserta mitigasinya yang tepat	pelaporan hasil audit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	Risiko Kepatuhan	ITJEN	adanya dorongan untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari manipulasi laporan audit	Internal dan Eksternal	C dan UC	Penurunan Kredibilitas Itjen	Kemen kumham	-Audit investigasi dari inspektorat wilayah I -.Adanya layanan UPG (unit pengendalian gratifikasi) -.Adanya UPP (unit pemberantasan pungutan liar) - Adanya Layanan WBS	Potensi pelaporan hasil audit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya
10	Sertifikasi ISO 37001:2016 di lingkungan Itjen	Pemenuhan data dukung belum memadai	Kemungkinan risiko pending/gagal sertifikasi/sertifikasi dicabut	Risiko Kepatuhan	ITJEN	Tidak terpenuhinya Klausul sesuai Standar ISO 37001:2016	Internal	C	Penurunan Kredibilitas Itjen	Inspektorat Jenderal	-Melakukan kegiatan memepertahankan sertifikasi ISO 37001:2016 -.Audit eksternal ISO SMAP oleh lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikasi	Kemungkinan risiko pending/gagal sertifikasi/sertifikasi dicabut

Risk Event	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Krireria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
11	Pencegahan dan penanganan Bencana	Prosedur pencegahan dan penanganan bencana belum dipahami oleh seluruh pegawai	Potensi terjadinya bencana/musibah (Kebakaran. Pencurian dll)	Risiko Operasional terkait bencana	ITJEN	-Pegawai tidak disiiplin menjalankan protokol keselamatan lerja-Belum terdapat sosialisasi/simulasi terhadap bencana -Sarana dan prasarana pencegahan dan penanganan bencana Belum dilakukan evaluasi berkala	Internal dan eskternal	C dan UC	-Kurang optimalnya kinerja ITJEN -Adanya korban jiwa -Kerusakan BMN -Kehilangan data penting	Inspektorat Jenderal	-adanya alat pemadam kebakaran -penugasan satpam selama 24 jam secara shift kerja	Potensi terjadinya bencana/musibah (Kebakaran. Pencurian dll)
12	Indeks Persepsi Integritas KEMENKUMHAM	Hasil survei Persepsi Integritas dari KPK belum mencerminkan tingkat integritas Kemenkumham	UPP belum optimal memberikan rekomendasi kepada pimpinan	Resiko Operasional	Tim Saber Pungli ITJEN	Kegiatan UPP belum terencana	Internal	C	-Terjadinya pungutan liar -Adanya OTT pegawai kemenkumham	Kemen kumham	UPP menjadi level output dalam postur anggaran	UPP belum optimal memberikan rekomendasi kepada pimpinan
13	Indeks RB ITJEN	Pelaksanan RB ITJEN belum terdokumentasi dengan baik	Pelaksanaan RB ITJEN diragukan akuntabilitasnya	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PPL)	Kurangnya komitmen seluruh pegawai ITJEN dalam mengimplementasikan RB	Internal	C	Implementasi pelaksanaan RB ITJEN tidak optimal menunjang implementasi pelaksanaan Rb kemenkumham	Inspektorat Jenderal	Workshop dan PKS PMPRB, Pembentukan SK Tim RB ,, pelaksanaan penguatan RB mellaui mekanisme rapat, pembentukan agen perubahan	-
14	Indeks RB ITJEN	Pendokumentasian Pelaksanaan implementasi SPIP belum optimal di laksanakan	Pelaksanaan RB ITJEN diragukan akuntabilitasnya	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PPL)	Tim RB yang ditetapkan dengan SK Irjen kurang bekerja sesuai uraian tugas da tidak tepat waktu	Internal	C	sda	Inspektorat Jenderal	Koordinasi pelaksanaan tugas Tim RB	
15	Indeks RB ITJEN	Pendokumentasian Pelaksanaan implementasi SPIP belum optimal di laksanakan	Pelaksanaan SPIP ITJEN diragukan akuntabilitasnya	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PPL)	Kompetensi SDM penyusun laporan penyelenggaraan SPIP kurang memahami 5 unsur pengendalian SPIP yang wajib dituangkan dalam laporan	Internal	C	menurunnya nilai pelaksanaan maturitas SPIP ITJEN	Inspektorat Jenderal	-Penyusunan Laporan SPIP -mengikuti workshop SPIP -menyusun SK Tim Penyelenggaraan SPIP	-
16	Indeks RB ITJEN	Pendokumentasian Pelaksanaan implementasi SPIP belum optimal di laksanakan	Pelaksanaan SPIP ITJEN diragukan akuntabilitasnya	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PPL)	Rekomendasi maturitas SPIP belum di tindaklanjuti seluruhnya	Internal	C	sda	Inspektorat Jenderal	Melakukan perbaikan penyelenggaraan maturitas SPIP ITJEN sesuai dengan rekomendasi	

Risk Event	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Krireria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
17	Indeks RB ITJEN	Manajemen Risiko ITJEN hanya sebagai pemenuhan dokumen	Manajemen Risiko ITJEN belum menjadi data early warning sytem	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PPL)	Manajemen risiko belummenjadi bagian yang dianggap penting dalam pelaksanaan kegiatan	Internal	C	Kinerja ITJEN tidak disusun berdasar penerapan manajemen risiko ITJEN	Inspektorat Jenderal	-Menyusun Penerapan manajemen Risiko ITJEN per tahun, disesuakan dengan sasaran dan indikator kinerja -melaksanakan evaluasi penerapan manajemen risiko -melaksanakan penanganan penerapan manajemen risiko -melaksanakan pemantauan penanganan penerapan manajemen risiko -menyusun llaporan penerapan manajemen risiko ITJEN	Manajemen Risiko ITJEN belum menjadi data early warning sytem
18	Indeks RB ITJEN	Efektifitas kerjasama belum optimal	Salah satu pihak kemitraan tidak bisa memenuhi kewajiban butir-butir MOU	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Humas dan SIP)	Monitoring Evaluasi perjanjian kerja sama belum dilaksanakan	Internal dan Eksternal	C/ UC	Belum diketahui efektif tidaknya kerjasama yang telah dilaksanakan	Inspektorat Jenderal	Melaksanakan kerjasama dengan K/L/Instansi lainnya	Salah satu pihak kemitraan tidak bisa memenuhi kewajiban butir-butir MOU
19	Nilai SAKIP ITJEN "Baik"	Belum optimal nya penerapan penghargaan dan sanki berdasarkan capaian indikator kinerja individu	Pelaksanaan SAKIP ITJEN diragukan akuntabilitasnya	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PPL)	Penyusun LAKIN ITJEN belum mengikuti diklat penyusunan LAKIN	Internal	C	Penyajian SAKIP dalam LAKIN ITJEN belum menggambarkan kinerja ITJEN	Inspektorat Jenderal	Mengikuti workshop evalausi SAKIP	-
20	Nilai SAKIP ITJEN "Baik"	Belum optimal nya penerapan penghargaan dan sanki berdasarkan capaian indikator kinerja individu	Pelaksanaan SAKIP ITJEN diragukan akuntabilitasnya	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PPL)	hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai data punish and reward	Internal	C	Penyajian SAKIP dalam LAKIN ITJEN belum menggambarkan kinerja ITJEN	Inspektorat Jenderal	Menyusun indikator kinerja level eselon 1 sd level eselon IV dan JFA	
21	Nilai SAKIP ITJEN "Baik"	Belum optimal nya penerapan penghargaan dan sanki berdasarkan capaian indikator kinerja individu	Pelaksanaan SAKIP ITJEN diragukan akuntabilitasnya	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PPL)	Belum disusun LAKIN per unit eselon II ITJEN	Internal	C	Penyajian SAKIP dalam LAKIN ITJEN belum menggambarkan kinerja ITJEN	Inspektorat Jenderal	Mengintensifikasikan koordinasi dengan Inspektur Wilayah dan Kepala Bagian guna mempercepat penyelesaian laporan kinerja	
22	Nilai SAKIP ITJEN "Baik"	Belum optimal nya penerapan penghargaan dan sanki berdasarkan capaian indikator kinerja individu	Pelaksanaan SAKIP ITJEN diragukan akuntabilitasnya	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PPL)	Anggaran dalam RKAL banyak dilakukan revisi anggaran (lebih dari lima kali revisi)	Internal	C	RKAL kurang efektif efektif , sehingga sering kali melakukan revisi DIPA/Anggaran pada tahun berjalan	Inspektorat Jenderal	Menyusun kebutuhan anggaran di Des TA berjalan untuk untuk TA. X+1	
23	Nilai SAKIP ITJEN "Baik"	Belum optimal nya penerapan penghargaan dan sanki berdasarkan capaian indikator kinerja individu	Pelaksanaan SAKIP ITJEN diragukan akuntabilitasnya	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PPL)	Anggaran dalam RKAL banyak dilakukan revisi anggaran (lebih dari lima kali revisi)	Internal	C	RKAL kurang efektif efektif , sehingga sering kali melakukan revisi DIPA/Anggaran pada tahun berjalan	Inspektorat Jenderal	Menyusun postur anggaran TA.X+1 untuk memudahkan dalam perencanaan kinerja	

Risk Event	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Krireria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
24	Nilai SAKIP ITJEN "Baik"	Belum optimal nya penerapan penghargaan dan sanki berdasarkan capaian indikator kinerja individu	Pelaksanaan SAKIP ITJEN diragukan akuntabilitasnya	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PPL)	Anggaran dalam RKAL banyak dilakukan revisi anggaran (lebih dari lima kali revisi)	Internal	C	RKAL kurang efektif efektif , sehingga sering kali melakukan revisi DIPA/Anggaran pada tahun berjalan	Inspektorat Jenderal	Men kunci usulan kegiatan yang tertuang dalam RKAKL saat periode pagu anggaran	
25	Nilai SAKIP ITJEN "Baik"	Belum optimal nya penerapan penghargaan dan sanki berdasarkan capaian indikator kinerja individu	Pelaksanaan SAKIP ITJEN diragukan akuntabilitasnya	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PPL)	Program kerja yang telah tersusun dalam PKPT, dalam pelaksanaan kegiatannya masih berubah tidak sesuai dengan PKPT terutama kegiatan untuk pemenuhan target IKU dan IKK	Internal	C	Jadwal pelaksanaan program pengawasan tidak sesuai dengan Kalender Kerja dan Disbursement Plan yang telah ditetapkan, mengakibatkan Bagian Keuangan kesulitan dalam menyediakan penganggarannya	Inspektorat Jenderal	Mengintensifkan koordinasi dengan Inspektur Wilayah dan Kepala Bagian di lingkungan Itjen perihal pelaksanaan program kerja agar memperhatikan kegiatan yang telah tersusun dalam PKPT dan bila ada perubahan agar memperhatikan target yang telah ditentukan sebelumnya	
26	Nilai SAKIP ITJEN "Baik"	Belum optimal nya penerapan penghargaan dan sanki berdasarkan capaian indikator kinerja individu	Salah menetapkan Perjanjian Kinerja	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PPL)	RENJA disusun diawal tahun, tidak diupdate diperiode pagu anggaran dan alokasi anggaran	Internal / Eksternal	C / UC	Salah menetapkan target dan besaran anggaran dalam Perjanjian Kinerja, yang seharusnya data antara RENJA, RKA-K/L dan Perjanjian Kinerja adalah sama, sehingga akan berdampak pada saat penyusunan evaluasi kinerja program maupun kegiatan	Inspektorat Jenderal	-Mengintensifkan koordinasi dengan Inspektur Wilayah dan Kepala Bagian bahwa data yang tertuang dalam RENJA, dipedomani sebagai dasar penyusunan RKA-K/L. -Mengupdate aplikasi RKAKL pada aplikasi satudja.kemenkeu.go.id -mengupdate data GPP gaji dari Bagian keuangan dalam aplikasi RKAKL pada setiap periode penyusunan pagu -mengupdate data pegawai dalam aplikasi RKAKL per golongan dari Bagian kepegawaian -mengupdate data RENJA dalam aplikasi KRISNA per periode penyusunan pagu	-
27	Nilai SAKIP ITJEN "Baik"	Belum optimal nya penerapan penghargaan dan sanki berdasarkan capaian indikator kinerja individu	Indikator Kinerja kurang memenuhi kriteria SMART	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Bagian PPL)	Indikator disusun belum berbasis outcome	Internal	C	Indikator Kinerja tidak bisa dihitung capaian targetnya	Inspektorat Jenderal	Berkoordinasi dengan DJA KEMENKEU, BAPPENAS, MENPAN dan APIP terkait penyusunan Indikator Kinerja berbasis SMART	-

Risk Event	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Krireria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
28	Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	Belum terpenuhinya kompetensi bagi seluruh SDM ITJEN	Pengembangan kompetensi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada jabatannya	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Kepegawaian)	- Terbatasnya anggaran Diklat, khususnya untuk penyelenggaraan diklat ekternal di luar BPSDM.	Internal	C	Terhambat pembentukan kader (talent) organisasi	Kemen kumham	- Mengajukan usul diklat yang mampu menurunkan GAP Kompetensi ke BPSDM melalui Setjen - Mengusulkan anggaran untuk penyelenggaraan diklat mandiri - Menyelenggarakan PKS, Workshop, FGD untuk memenuhi pengembangan kompetensi selain Diklat -Melakukan analisis efektivitas pelatihan/ diklat yang sudah dilakukan	Pengembangan kompetensi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada jabatannya
29	Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	Belum terpenuhinya kompetensi bagi seluruh SDM ITJEN	Pengembangan kompetensi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada jabatannya	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (kepegawaian)	Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti diklat tidak hadir dan belum ada punishment	Internal		Pengembangan pegawai tidak sesuai dengan rencana diklat pegawai yang telah disusun	Inspektorat Jenderal	-Membuat rencana diklat/ pengembangan pegawai yang memuat diklat, peserta, dan jadwal pelaksanaan - Membuat usulan peraturan internal yang mengatur punishment bagi pegawai yang tidak bersedia mengikuti diklat, workshop, dll - Membuat rekap diklat pegawai (KPI Diklat)	
30	Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	Belum terpenuhinya kompetensi bagi seluruh SDM ITJEN	Pengembangan kompetensi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada jabatannya	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (kepegawaian)	Masih terdapat pegawai yang tidak mendapatkan diklat yang sesuai dengan GAP Kompetensinya	Internal		Pengembangan karir pegawai terhambat sehingga akan berdampak pada pembentukan talent-talent organisasi	Kemen kumham	- Analisis hasil uji kompetensi pegawai - Penentuan diklat berdasarkan kebutuhan GAP kompeyensi pegawai - pegawai yang diberangkatkan untuk diklat sesuai dengan rencana pengembangan pegawai	
31	Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	Belum terpenuhinya kompetensi bagi seluruh SDM ITJEN	Pengembangan kompetensi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada jabatannya	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (kepegawaian)	Daftar Diklat dan kuota yang ditetapkan oleh Penyelenggara Diklat (internal/eksternal) terbatas untuk Itjen	Internal		Terdapat pegawai yang tidak mendapatkan diklat pada tahun tersebut	Kemen kumham	- Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Setjen dan BPSDM untuk penambahan kuota diklat	
32	Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	Belum terpenuhinya kompetensi bagi seluruh SDM ITJEN	Pengembangan kompetensi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada jabatannya	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (kepegawaian)	Pola mutasi internal pegawai belum dilakukan secara berkala berdasarkan masa kerja pegawai pada unit kerja terakhir	Internal	C	-Rawan terjadi konflik dan benturan kepentingan -Dapat menghambat pengembangan karir Pegawai yang bersangkutan	Inspektorat Jenderal	-Rapat pimpinan dalam rangka mutasi/rotasi antar Jabatan Administrasi, Fungsional Umum (JFU), dan Fungsional Tertentu (JFT) -Mutasi Diagonal	

Risk Event	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Krireria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
33	Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	Layanan kepegawaian belum optimal	Pemberian layanan kepegawaian terkait kehadiran pegawai, kenaikan pangkat gaji berkala, update data simpeg, cuti, disiplin pegawai dan lainnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (kepegawaian)	Pengusulan kenaikan pangkat/jabatan terlambat	Internal / Eksternal	C / UC	-Ketidakpuasan pegawai atas layanan kepegawaian (pangkat, jabatan, PAK, diklat) dan karir pegawai menjadi terhambat - Ketidakpuasan pegawai atas layanan kepegawaian (pangkat, jabatan, PAK, diklat) dan berkurangnya hak-hak finansial pegawai	Inspektorat Jenderal	Menyusun daftar nominatif kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, gaji berkala di awal tahun anggaran	
34	Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	Layanan kepegawaian belum optimal	Pemberian layanan kepegawaian terkait kehadiran pegawai, kenaikan pangkat gaji berkala, update data simpeg, cuti, disiplin pegawai dan lainnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (kepegawaian)	Keterlambatan terbitnya SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jabatan	External	UC	Koordinasi intensif dengan Biro Kepegawaian dan KN	Inspektorat Jenderal	Melakukan konsiyering perihal kenaikan pangkat dan jabatan ke biro kepegawaian sekjen	
35	Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	Layanan kepegawaian belum optimal	Pemberian layanan kepegawaian terkait kehadiran pegawai, kenaikan pangkat gaji berkala, update data simpeg, cuti, disiplin pegawai dan lainnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (kepegawaian)	Simpeg tidak dilakukan *update* data secara berkala	Internal	C	Informasi data pegawai tidak akuntabel	Kemen kumham	-Melakukan update data oleh admin internal itjen - Melakukan rekon data pegawai antar bagian	
36	Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	Layanan kepegawaian belum optimal	Tidak tercapainya target pengisian LHKASN dilingkungan Kemenkumham	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (kepegawaian)	Tidak updatenya data pegawai Wajib Lapor LHKASN	Internal	C	Tidak tercapainya pengisian LHKASN di lingkungan Kemenkumham	Kemen kumham	Sosialisasi mengenai LHKASN dan aplikasi pengisian LHKASN serta melakukan pendalaman terkait LHKASN kepada Admin LHKASN masing-masing satuan kerja	
37	Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	Layanan kepegawaian belum optimal	Pegawai ITJEN terlambat melaporkan LHKPN	Resiko Operasional	Sekretariat ITJEN (kepegawaian)	-Adanya penambahan fitur tata cara penginputan aplikasi -Kurangnya respon pegawai yang wajib lapor LHKPN	Internal / Eksternal	C / UC	Keterlambatan pengisian LHKPN di Lingkungan Itjen	Kemenkumham	- PKS tata cara pengisian LHKPN - Sosialisasi	
38	Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham (Tingkat 4)	Tata nilai Kemenkumham belum optimal ditanamkan pada setiap ASN	Bertambahnya Pelanggaran kode etik maupun sanksi hukdis yang dilakukan oleh pegawai ITJEN	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (kepegawaian)	Belum ada mekanisme internalisasi tata nilai Kemenkumham	Internal	C	Pelanggaran meningkat	Inspektoat Jenderal	-Whorkshop budaya kerja	-
39									Indeks Integritas menurun	Inspektoat Jenderal	-arahan pimpinan	

Risk Event	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Krireria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
40	Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham (Tingkat 4)	Tata nilai Kemenkumham belum optimal ditanamkan pada setiap ASN	Bertambahnya Pelanggaran kode etik maupun sanksi hukdis yang dilakukan oleh pegawai ITJEN	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (kepegawaian)	Belum ada mekanisme internalisasi tata nilai Kemenkumham	Internal	sda	Kepercayaan terhadap ITJEN menurun	Inspektoat Jenderal	-Menetapkan agen perubahan	
41	Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham (Tingkat 4)	Tata nilai Kemenkumham belum optimal ditanamkan pada setiap ASN	Bertambahnya Pelanggaran kode etik maupun sanksi hukdis yang dilakukan oleh pegawai ITJEN	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (kepegawaian)	Tidak ada evaluasi terhadap para agen perubahan / pegawai yang telah mengikuti TOT Tunas Integritas	Internal	C	Tidak ada role model / agen perubahan yang dapat memberikan nilai tambah untuk peningkatan kinerja ITJEN	Inspektoat Jenderal	-Diklat Settifikasi " Role Model / Agen Perubahan" dengan KPK dan lembaga pengembangan integritas - PKS integritas/ revolusi mental	
42	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Pengawasan belum Optimal	Belum terpenuhinya kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Humas dan SIP)	Formasi SDM ITJEN yang memilki latar belakang Teknologi Informasi belum terpenuhi	Eksternal	C	Kemajuan TI -ITJEN tertinggal dibandingkan dengan TI unit eselon I lainnya	Inspektorat Jenderal	- Menetapkan Tim Pengelola Teknologi Informasi - Penyusunan Roadmap TI Itjen	Belum terpenuhinya kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan
43								UC	Keterbatasan pengetahuan tentang teknologi iinformasi terutama terkait pelaksanaan audit	Inspektorat Jenderal	- Diklat e-audit - Diklat TI - Penyusunan Pedoman Audit TIK - Penyusunan Roadmap Itjen	
44	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Pengawasan belum Optimal	Belum terpenuhinya kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Humas dan SIP)	Belum adanya perencanaan / grand design terkait Pengembangan teknologi Informasi	Internal	C	Informasi terkait hasil pengawasan belum optimal	Inspektorat Jenderal	Integrasi SIMWAS dan e-office	
45	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Pengawasan belum Optimal	Belum terpenuhinya kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Humas dan SIP)	Koneksi jaringan internet terputus Terputusnya Jaringan Kelistrikan	Internal	C	Penggunaan bandwith tidak tepat guna Downtime pada Server	Inspektorat Jenderal	Penerapan bandwith manager, firewall dan anti spyware Pengunaan UPS	
46	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Pengawasan belum Optimal	Belum terpenuhinya kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Humas dan SIP)	Internet Service Provider down	Eksteranl	UC	Koneksi internet terputus	Inspektorat Jenderal	Memakai lebih dari satu provider	

Risk Event	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Krireria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
47	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Pengawasan belum Optimal	Belum terpenuhinya kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Humas dan SIP)	Terkena spyware dan banyak terinstall add on	Internal	C	Performa PC dan laptop rendah	Inspektorat Jenderal	Penggunaan firewall dan antivirus	
48	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Pengawasan belum Optimal	SIMWAS/EMAWAS kurang optimal digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan putusan bagi pimpinan	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Humas dan SIP)	Pengembangan sistem informasi belum mengakomodir kebutuhan	Internal	C	Data hasil pengawasan tidak update bila digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan	Inspektorat Jenderal	Pengembangan SIMWAS	SIMWAS/EMAWAS kurang optimal digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan putusan bagi pimpinan
49	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Pengawasan belum Optimal	SIMWAS/EMAWAS kurang optimal digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan putusan bagi pimpinan	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Humas dan SIP)	penginputan data hasil pengawasan tidak dilakukan secara tepat waktu	Internal	C	Data hasil pengawasan tidak update bila digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan	Inspektorat Jenderal	komitmen bersama dalam penginputan hasil pengawasan pada aplikasi SIMWAS	
50	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Pengawasan belum Optimal	SIMWAS/EMAWAS kurang optimal digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan putusan bagi pimpinan	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Humas dan SIP)	Belum dilakukan analisis terhadap hasil SIMWAS	Internal	C	Data hasil pengawasan tidak update bila digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan	Inspektorat Jenderal	Dilakukan analisis atas hasil pengawasan	
51	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Pengawasan belum Optimal	Informasi Sarana pengaduan belum optimal membantu masyarakat terkait pelaporan pengaduan	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Humas dan SIP)	belum optimalnya edukasi dan sosialiasi kepada masyarakat (layanan pengguna)	Eksternal	UC	Masyarakat tidak dapat menggunakan layanan pegaduan secara optimal	Kemen kumham	Penyebaran informasi layanan pengaduan kepada masyarakat, adanya jaminan kerahasiaan pelapor. Dan membangun SIPIDU dan E WAS (sistem informasi pengaduan integrasi dan terpadu)	-
52	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Pengawasan belum Optimal	Data Hukuman Disiplin tidak update	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Humas dan SIP)	Satker belum seluruhnya menyampaikan laporan data rekapitulasi hukuman disiplin pegawai	Eksternal	UC	Data belum terupdate pada database itjen	Inspektorat Jenderal	Surat edaran tertib administrasi laporan hukuman disiplin pegawai serta pengembangan Aplikasi Hukuman Disiplin dalam aplikasi SIMWAS VERSI 3.0	Data Hukuman Disiplin tidak update
53	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Pengawasan belum Optimal	Data temuan tidak update	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Humas dan SIP)	Tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan BPK belum dituntaskan dalam SIPTL	Eksternal	UC	Masih ada temuan lama hasil pemeriksaan BPK	Inspektorat Jenderal	Surat edaran Irjen perihal penyelesaian tindak lanjut temuan BPK	Data temuan tidak update

Risk Event	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Krireria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
54	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Pengawasan belum Optimal	Data temuan tidak update	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Humas dan SIP)	SIMWAS belum terintegrasi dengan SIPTL	Internal	C	Tidak dapat menyajikan data perkembangan tindak lanjut secara realtime	Inspektorat Jenderal	Berkoordinasi dengan BPK untuk mengintegrasikan SIMWAS dan SIPTL	
55	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Pengawasan belum Optimal	Data temuan tidak update	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Humas dan SIP)	Kesalahan penginputan data dalam SIMWAS dan SIPTL	Internal	C	Keterlambatan tindak lanjut	Inspektorat Jenderal	Kelengkapan data pendukung	
56	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal	Pengelolaan Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Pengawasan belum Optimal	Data temuan tidak update	Risiko Operasional	Sekretariat ITJEN (Humas dan SIP)	Hasil pengawasan APIP terlambat diinput dalam SIMWAS	Internal	C	Pengelolaan data hasil pengawasan yang tidak update	Inspektorat Jenderal	komitmen bersama dalam penginputan temuan hasil pengawasan pada aplikasi simwas	
57	Perentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel	Manajemen aset yang belum optimal	Belum seluruh aset selesai dilakukan penetapan status pengguna (PSP)	Risiko Operasional	Ses.Itjen (Bag Umum)	Operator BMN belum menyusun PSP atas BMN yang ada	Internal	C	1. Administrasi pengelolaan BMN belum tertib 2. Alokasi anggaran pemeliharaan terbatas	Inspektorat Jenderal	1. Melakukan invetarisasi ulang seluruh BMN yang belum di PSP 2. Mempercepat proses PSP	Belum seluruh aset selesai dilakukan penetapan status pengguna (PSP)
58	Perentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel	Keterlambatan pemrosesan surat masuk melalui SISUMAKER	Informasi materi surat terlambat diterima pimpinan	Risiko Operasional	Ses.Itjen (Bag Umum)	Sisumaker sering down	Eksternal	UC	Pimpinan tidak dapat mendisposisikan secara tepat waktu	Inspektorat Jenderal	Berkoordinasi dengan PUSDATIN KEMENKUMHAM	-
59	Perentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel	Kurangnya informasi tentang data arsip aktif dan in aktif	Informasi materi surat terlambat dikirim ke unit terkait	Risiko Operasional	Ses.Itjen (Bag Umum)	Rendahnya respon dari penerima pesan	Internal	C	Informasi terlambat diterima oleh uit terkait	Inspektorat Jenderal	adanya SOP SISUMAKER	-
60	Perentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel	Kurangnya informasi tentang data arsip aktif dan in aktif	Arsip hasil pengawasan dan administrasi rusak/ hilang	Risiko Operasional	Ses.Itjen (Bag Umum)	Kurang SDM JFT Arsiparis	Internal	C	Penumpukan arsip	Inspektorat Jenderal	SOP Pengarsipan (jadwal retensi arsip)	-
61	Perentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel	Inventarisasi BMN tidak update	Arsip hasil pengawasan dan administrasi rusak/ hilang	Risiko Operasional	Ses.Itjen (Bag Umum)	Belum dilaksanakan retensi arsip	Internal	C	Pengelolaan Arsip kurang optimal	Inspektorat Jenderal	Penambahan JFT Arsipparis	
62	Perentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel	Pemeliharaan dan operasional kantor kurang optimal	Arsip hasil pengawasan dan administrasi rusak/ hilang	Risiko Operasional	Ses.Itjen (Bag Umum)	Gudang arsip yang beralokasi ditanggerang sebagian digunakan bukan untuk penempatan arsip	Internal	C	Gudang arsip di tanggerang menjadi sempit / terbatas/ tidak dapat menampung arsip	Inspektorat Jenderal	Gudang Arsip ditanggerang sudah difungsikan sebagai gudang arsip secara penuh, tidak ada lagi fungsi lain selain untuk arsip	
63	Perentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel	Inventarisasi BMN tidak update	Aset BMN hilang	Risiko Operasional	Ses.Itjen (Bag Umum)	Inventarisasi aset BMN tidak dilaksanakan secara periodik	Internal	C	Jumlah dan keberadaan aset BMN tidak sama dengan yang tertera dalam data BMN	Inspektorat Jenderal	Inventarisasi aset BMN wajib dilaksanakan secara periodik	Aset BMN hilang

Risk Event	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Krireria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
64	Perentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel	Pemeliharaan dan operasional kantor kurang optimal	Aset BMN hilang	Risiko Operasional	Ses.Itjen (Bag Umum)	Pemindahan aset BMN antar ruangan tidak dilakukan sesuai prosedur	Internal	C	Jumlah dan keberadaan aset BMN tidak sama dengan yang tertera dalam data BMN	Inspektorat Jenderal	Inventarisasi aset BMN tiap ruangan	
65	Perentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di tahun berjalan	Aset BMN hilang	Risiko Operasional	Ses.Itjen (Bag Umum)	Aset BMN dibawa pegawai tidak sesuai dengan prosedur	Internal	C	Jumlah dan keberadaan aset BMN tidak sama dengan yang tertera dalam data BMN	Inspektorat Jenderal	Penomoran aset	
66	Perentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel	Pemeliharaan dan operasional kantor kurang optimal	'Pemenuhan sarana prasarana pengawasan yang belum optimal	Risiko Operasional	Ses Itjen (Bag. Umum)	Belum memiliki rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan jangka panjang 5 sd 10 tahun ke depan	Eksternal	UC	APIP dalam melakukan pengawasan belum bekerja secara maksimal	Inspektorat Jenderal	Sudah menyusun RKBMN	-
67	Perentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di tahun berjalan	Kebakaran Gedung	Risiko Operasional	Ses Itjen (Bag. Umum)	Konsleting listrik, merokok tidak pada tempatnya	Internal	C	Kerugian materil dan immaterial	Inspektorat Jenderal	Membuat aturan dilarang merokok di dalam gedung terkecuali di ruangan yang telah ditentukan dan ada ventilasi udaranya. Simulasi kebakaran untuk semua pegawai	-
68	Perentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di tahun berjalan	Pengadaan telat dilaksanakan	Risiko Operasional	KPAdan ULP	ULP, Pejabat pengadaan dan PPK kurang respon	Internal	C	realisasi anggaran tpengadaan tidak terserap sesuai Procurement plan	Inspektorat Jenderal	-Menyusun RUP -Lelang Pra DIPA	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di tahun berjalan
69	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel (WTP)	Terdapat realisasi belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan	salah saji dalam laporan keuangan itjen	Risiko Pelaporan	Sekretariat ITJEN (Keuangan dan Umum)	Keterbatasan kompetensi Tim Penyusun Laporan Keuangan Pengendalian internal belum optimal	Internal	C	Adanya temuan BPK	Inspektorat Jenderal	Mengikuti sertifikasi akuntansi pemerintahan (CGAA dan CGAE) Diklat Bendahara Diklat PPK Diklat PPSPM	salah saji dalam laporan keuangan itjen
70	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel (WTP)	Data realisasi penyerapan anggaran yang disajikan kurang akurat/perbedaan data realisasi anggaran antara Bagian Keuangan dengan Bagian lain dan ITWIL	salah saji dalam laporan keuangan itjen	Risiko Pelaporan	Sekretariat ITJEN (Keuangan dan Umum)	Update Aplikasi SAIBA yang tidak sinkron dengan update Aplikasi SIMAK BMN	Eksternal	UC	Munculnya perbedaan data antara data SAIBA dengan data SIMAK BMN	Kemenkumham	- Berkoordinasi dengan KPPN dan KPKNL - Berkoordinasi dengan Biro Keuangan - Rekonsiliasi data Laporan Keuangan	-
71	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel (WTP)	Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Itjen	Keterlambatan dalam menyampaikan Kontrak/ SPK yang telah ditandatangani	Risiko Operasional	Ses ITJEN (Keuangan)	Adanya perubahan/ perbaikan pada data Kontrak/SPK karena data yang disajikan tidak lengkap	Internal	C	Adanya pengenaan denda keterlambatan	Inspektorat Jenderal	Melakukan koordinasi dengan ULP dan Penyedia	Keterlambatan dalam menyampaikan Kontrak/ SPK yang telah ditandatangani

Risk Event	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Krireria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
72	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel (WTP)	Data realisasi penyerapan anggaran yang disajikan kurang akurat/perbedaan data realisasi anggaran antara Bagian Keuangan dengan Bagian lain dan ITWIL	Perbedaan data realisasi penyerapan anggaran di Bagian Keuangan dengan Itwil/Bagian	Risiko Operasional	Ses ITJEN (Keuangan)	Keterlambatan dalam menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dan pencatatan pertanggungjawaban	Internal	C	Realisasi anggaran tidak maksimal	Inspektorat Jenderal	Bagian keuangan dan Bendahara Pengeluaran melakukan koordinasi dengan pelaksana kegiatan supaya segera melengkapi bukti pertanggungjawaban dengan lengkap dan benar setelah kegiatan selesai dilaksanakan	-
73	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel (WTP)	Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Itjen	Pembebanan TGR yang belum diselesaikan	Risiko Operasional	Ses ITJEN (Keuangan)	Data dukung untuk persyaratan proses penyelesaian administratif Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi belum diserahkan oleh Pemegang/Penanggung Jawab Kendaraan kepada Tim TP/TGR	Internal	C	Adanya kerugian negara yang belum dapat dikembalikan/ dilakukan penyetoran ke kas negara	Kemen kumham	Permenkumham Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara pada Kemenkumham	Pembebanan TGR yang belum diselesaikan
74	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel (WTP)	Data SAIBA dan BMN tidak sinkron	Perbedaan antara data SAIBA dan data SIMAK BMN	Risiko Operasional	Ses ITJEN (Keuangan)	Adanya perbedaan pemahaman dan ketidak telitian antara operator SAIBA dan SIMAK BMN sehingga terjadi kesalahan dalam penginputan ke dalam aplikasi	Internal	C	Penyusunan Laporan Keuangan menjadi terhambat	Kemen kumham	- Melakukan koordinasi antara Bagian Keuangan dengan Bagian Umum - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal antara operator SAIBA dengan operator SIMAK BMN	-

Risk Event	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Krireria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
75	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel (WTP)	Pembayaran tagihan pihak ketiga/penyedia belum tepat waktu	Pembayaran tagihan dari pihak ketiga/penyedia yang terlambat/belum diselesaikan	Risiko Keuangan	Ses ITJEN (Keuangan)	Pihak ketiga/penyedia terlambat dalam menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pengeluaran	Eksternal	U/C	1. Pembayaran tagihan menjadi terlambat 2. Menimbulkan piutang pihak ketiga yang harus dialokasikan pada anggaran tahun berikutnya	Inspektorat Jenderal	Berkoordinasi dengan pihak ketiga/penyedia supaya penyampaian tagihan dapat dilakukan segera sesuai jadwal yang telah disepakati dengan didukung dengan data yang lengkap	-
76	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel (WTP)	Masih terdapat Bendahara belum memiliki kompetensi yang memadai	Bendahara dalam melaksanakan fungsi perbendaharaan belum ditunjang dengan kompetensi yang memadai	Risiko Operasional	Ses ITJEN (Keuangan)	Terdapat Bendahara yang belum mengikuti Diklat Perbendaharaan	Internal	U/C	Laporan Pertanggungjawaban (LPj) kurang akuntabel	Inspektorat Jenderal	Mengusulkan Bendahara yang belum memiliki Sertifikasi untuk segera diikutsertakan Diklat Perbendaharaan atau mengikuti Bimtek tentang Perbendaharaan	-
77	Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal (88%)	kegiatan terlambat dipertangung jawabkan	Uang persediaan tidak memenuhi kebutuhan	Risiko Operasional	Ses ITJEN (Keuangan)	Pengajuan usulan anggaran berdekatan dengan pelaksanaan kegiatan	Internal	C	Kinerja pengelolaan uang persedian rendah	Inspektorat Jenderal	-Membuat surat edaran Ses. ITJEN terkait batasan waktu usulan RAB dan KAK Pelaksanaan Kegiatan -Menunda pemberian uang kegiatan selanjut sebelum pertanggungjawaban yang terdahulu diselesaikan	Uang persediaan tidak memenuhi kebutuhan
78	Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal (88%)	Masih terdapat dokumen pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban yang lengkap dan benar	Realisasi anggaran belum mencerminkan kinerja yang dihasilkan	Risiko Operasional	Ses ITJEN (Keuangan)	Pelaksana kegiatan tidak segera melengkapi bukti pertanggungjawaban dengan lengkap dan benar	Internal	C	Penggunaan anggaran negara tidak dapat dipertanggung jawabkan atau tidak dapat diyakinkan kebenarannya	Inspektorat Jenderal	Bendahara Pengeluaran melakukan verifikasi seluruh dokumen penggunaan anggaran yang tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban yang lengkap dan benar	-
79	Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal (88%)	Kurang optimalnya peran POKJA Tim RB, SAKIP dan SPIP ITJEN yang telah ditetapkan	Realisasi anggaran belum mencerminkan kinerja yang dihasilkan	Risiko Operasional	Ses ITJEN (Keuangan)	Dokumen realisasi belanja dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran tidak memenuhi kriteria lengkap dan benar	Internal	C	Penggunaan anggaran negara tidak dapat dipertanggung jawabkan atau tidak dapat diyakinkan kebenarannya	Inspektorat Jenderal	Bendahara Pengeluaran melakukan koordinasi dengan pelaksana kegiatan yang belum melengkapi bukti pertanggungjawaban dengan lengkap dan benar	-
80	Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal (88%)	Pagu belanja non operasional masih dalam bentuk total bukan per kegiatan	Realisasi anggaran belum mencerminkan kinerja yang dihasilkan	Risiko Operasional	Ses ITJEN (Keuangan)	PPK dan Pejabat Penguji SPM belum optimal dalam melakukan pengujian bukti tagihan	Internal	C	Penggunaan anggaran negara tidak dapat dipertanggung jawabkan atau tidak dapat diyakinkan kebenarannya	Inspektorat Jenderal	KPA meningkatkan pengendalian intern kepada Bendahara Pengeluaran, PPK dan PPSPM dalam melakukan pengujian bukti tagihan maupun pembayaran	-
81	Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal (88%)	Terdapat keterlambatan dalam memberikan layanan kepegawaian	Pagu Minus dalam pengelolaan anggaran	Risiko Operasional	Ses ITJEN (Keuangan)	Kesalahan pembebanan, penambahan belanja pegawai	Internal	C	Terdapat pagu yang minus antar kegiatan/ komponen/ sub komponen	Inspektorat Jenderal	- Pengajuan RAB pada saat penyusunan RKA-K/L maupun pada saat usulan Revisi wajib memperhatikan PMK tentang Bagan Akun Standar dan Realisasi SPAN - Revisi sebelum batas waktu revisi ditutup	-

Risk Event	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Krireria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
82	Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal (88%)	Panitia / Pokja pengadaan belum optimal memahami proses pengadaan	Pembayaran kegiatan tidak sesuai dengan bukti	Risiko keuangan	Ses ITJEN (Keuangan)	Kesalahan Pengajuan RAB	Internal	C	Pembayaran anggaran kegiatan tidak maksimal	Inspektorat Jenderal	Membayarkan anggaran kegiatan sebesar 80% dari Pagu yang diajukan	-
83	Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal (88%)	Terjadinya benturan kepentingan dalam pecepatan pemberian anggaran kegiatan	Pembayaran kegiatan tidak sesuai dengan bukti	Risiko keuangan	sda	Verifikasi tidak dilakukan secara teliti	Internal	C	Kesalahan jumlah anggaran yang dibayarkan	Inspektorat Jenderal	mereviu kembali KAK dan RAB pelaksanaan yang diajukan oleh ITWIL/ Bagian	-
84	Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal (88%)	Belum memiliki grand design Teknologi Informasi Pengawasan	anggaran perjalanan dinas belum dapat dibayarkan tepat waktu	Risiko Operasional	Ses ITJEN (Keuangan)	kesalahan MAK dalam pengajuan perjaldin	Internal	C	keterlambatan pembayaran kegiatan perjalanan dinas	Inspektorat Jenderal	-sudah adanya SOP pengajuan perjaldin -verifikasi RAB oleh Kasub Perjaldin	-
85	Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal (88%)	Perbedaan data temuan	Gaji yang diterima pegawai lebih/ kurang	Risiko keuangan	Ses ITJEN (Keuangan)	Salah input data pada aplikasi GPP	Internal	C	Pengembalian/ pembayaran gaji oleh/ kepada pegawai	Inspektorat Jenderal	Verifikasi ulang data pegawai	-
86	Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal (88%)	Adanya benturan kepentingan dalam proses pemberian surat keterangan catatan cela	Terlambatnya pencairan anggaran	Risiko Operasional	Ses ITJEN (Keuangan)	Salah pembukuan pertanggungjawaban oleh bendahara	Internal	C	Anggaran kegiatan tidak tersedia	Inspektorat Jenderal	Supervisi oleh Kasub Perbendaharaan untuk setiap pertanggungjawaban	-
87	Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal (88%)	Layanan SIPIDU belum optimal	Hilangnya berkas pertanggungjawaban Perjalanan Dinas	Risiko Operasional	Ses ITJEN (Keuangan)	Tidak tertib dalam pengarsipan berkas perjalanan dinas	Internal	C	Perjalanan Dinas tidak dapat dipertanggungjawaban kan dengan cepat sesuai waktu yang ditetapkan	Inspektorat Jenderal	Penerapan klasifikasi arsip/ berkas berdasarkan Inspektorat Wilayah dan Bagian	-
88	Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal (88%)	Layanan SIPIDU belum optimal	Terdapat pengembalian uang perjalanan dinas LS	Risiko Operasional	Ses ITJEN (Keuangan)	Perhitungan pengajuan LS tidak tepat	Internal	C	Sisa anggaran LS tidak dapat dipergunakan kembali	Inspektorat Jenderal	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RAB yang diajukan	Terdapat pengembalian uang perjalanan dinas LS
89	Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal (88%)	Layanan SIPIDU belum optimal	Update data pegawai pada aplikasi GPP bermasalah	Risiko Operasional	Ses ITJEN (Keuangan)	Terlambatnya pengajuan gaji pegawai ke KPPN	Eksternal	UC	Terlambatnya pembayaran gaji kepada pegawai	Inspektorat Jenderal	Mengupdate aplikasi GPP	-
90	0 (nol) kasus penyuapan yang terbukti dalam memfasilitasi peningkatan nilai RB, nilai SAKIP, nilai maturitas SPIP ITJEN	Kurang optimalnya peran POKJA Tim RB, SAKIP dan SPIP ITJEN yang telah ditetapkan	penyuapan kepada Auditor ITWIL I selaku tim evaluasi pelaksanaan RB, SAKIP dan SPIP, untuk menaikan nilai ITJEN dan penyuapan oleh POKJA kepada Kasub KRB	Risiko Kepatuhan	Sekretraiat ITJEN (Bagian PPL)	Data dukung RB, SAKIP dan SPIP disampaikan oleh masing-masing pokja tidak lengkap	Internal dan eksternal	C dan UC	Nilai RB, SAKIP dan ITJEN buruk	Inspektorat Jenderal	Koordinasi POKJA Tim RB, SAKIP dan SPIP ITJEN untuk menyampaikan laporan per triwulan secara tepat waktu	-

Risk Event	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Krireria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
91	0 (nol) kasus penyuapan yang terbukti dalam memberikan anggaran per jenis belanja dan per kegiatan per ITWIL dan Bagian	Pagu belanja non operasional masih dalam bentuk total bukan per kegiatan	menerima suap dari ITWIL / Bagian yang menginginkan alokasi anggaran lebih besar	Risiko Kepatuhan	Sekretraiat ITJEN (Bagian PHP)	Belum ada rumusan / formulasi baku tentang pembagian pagu belanja non operasional di ITJEN	Internal	C	pembagian pagu non operasional per ITWIL/Bagian secara tidak obyektif	Inspektorat Jenderal	Mengevaluasi dari capaian output, capaian indikator kinerja kegiatan dan realisasi anggaran 2 minimal tahun sebelumnya	-
92	0 (nol) kasus penyuapan yang terbukti dalam memfasilitasi pengelolaan kepegawaian ITJEN (mutasi,promosi,kenaikan pangkat dan pengelolaan umum kepegawaian lainnya)	Terdapat keterlambatan dalam memberikan layanan kepegawaian	menerima suap dari pegawai yang mengurus data kepegawaian.	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Kepegawaian)	Penyelesaian urusan kepegawaian di luar SOP	Internal	C	Tidak terpenuhinya hak-hak pegawai	Pegawai ITJEN	Mengoptimalkan kinerja bagian kepegawaian sesuai dengan SOP	menerima suap dari pegawai yang mengurus data kepegawaian.
93	0 (nol) kasus penyuapan yang terbukti dalam pengadaan barang/jasa	Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan prosedur	terjadinya resiko diberikannya penilaian secara subjektif yang menguntungkan salah satu peserta pengadaan	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Bagian Umum)	Pengendalian terkait pengadaan barang/jasa dari internal ITJEN belum optimal	Internal	C	Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan standar	Inspektorat Jenderal	Pelaksanaan pengadaan sesuai dengan SOP	terjadinya resiko diberikannya penilaian secara subjektif yang menguntungkan salah satu peserta pengadaan
94	0 (nol) kasus penyuapan yang terbukti dalam memfasilitasi layanan keuangan	Terjadinya benturan kepentingan dalam pecepatan pemberian anggaran kegiatan	menerima suap dari pegawai untuk mempercepat ketersediaan anggaran kegiatan	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Keuangan)	Pemberian layanan keuangan tidak sesuai SOP	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	Inspektorat Jenderal	Menyusun rekapitulasi pengajuan anggaran harian	menerima suap dari pegawai untuk mempercepat ketersediaan anggaran kegiatan
95	0 (nol) kasus penyuapan yang terbukti dalam memfasilitasi layanan Teknologi Informasi	Belum memiliki grand design Teknologi Informasi Pengawasan	merubah/ menghilangkan data dalam server	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Humas dan SIP)	User ID dan Password tidak terbatas pada pegawai tertentu	Internal	C	Data base pengawasan tidak update/ hilang	Inspektorat Jenderal	-User ID dan pasword khusus untuk pegawai yang menengani server -fakta integritas	merubah/ menghilangkan data dalam server
96	0 (nol) kasus penyuapan yang terbukti dalam mengelola database temuan Pengawasan dan Pemeriksaan	Perbedaan data temuan	menghilangkan database temuan pengawasan dan pemeriksaan	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Humas dan SIP)	Tidak update input data dalam SIMWAS maupun SIPTL	Internal dan eksternal	C dan UC	Data base pengawasan tidak update/ hilang	Kemen kumham	Rekon Internal ITJEN maupun dengan BPK/BPKP/ORI	menghilangkan database temuan pengawasan dan pemeriksaan
97	0 (nol) kasus penyuapan yang terbukti dalam mengelola database Hukuman Disiplin pegawai	Adanya benturan kepentingan dalam proses pemberian surat keterangan catatan cela	pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Humas dan SIP)	Belum adanya SOP permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	Internal dan Eksternal	C/ UC	Menurunkan citra ITJEN	Kemen kumham	Reviu berjenjang oleh pimpinan	pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai

Risk Event	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Krireria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
98	0 (nol) kasus penyuapan yang terbukti dalam memfasilitasi layanan pengelolaan pengaduan, wbs dan gratifikasi	Layanan SIPIDU belum optimal	tidak memproses pengaduan	Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN (Humas dan SIP)	Adanya intevensi dari pihak internal/eksternal	Internal dan Eksternal	C/ UC	Pengaduan tidak di tindaklanjuti	Kemen kumham	Melakukan monitoring atas pengaduan yang diterima secara berkala	tidak memproses pengaduan
99	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham (level 3 menuju 4)	IACM/KAPIP level 4 belum tercapai	Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya memenuhi standar mutu KAPIP dan standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)	Risiko Kepatuhan	Inspektorat Wilayah	- Sumber daya belum memadai - Administrasi tidak tertib -data dukung elemen belum terpenuhi sesuai LKE - Ketidaktahuan terhadap mekanisme penilaian.	Internal	C	penurunan reputasi dan penurunan kinerja	Kemen kumham	Self assessment yang dilakukan oleh intern Itjen	Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya memenuhi standar mutu KAPIP dan standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)
100	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham (level 3 menuju 4)	PKPT berbasis risiko belum diterapkan secara optimal sesuai Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR)	Satker yang berisiko tinggi belum teridentifikasi dalam PKPT			Manajemen risiko belum dilaksanakan secara menyeluruh seluruh satker	Internal	C	Nilai Maturitas IACM / KAPIP belum Optimal	Kemen kumham	- Pelatihan KAPIP - Pendampingan penyusunan MR satker	Satker yang berisiko tinggi belum teridentifikasi dalam PKPT
101	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja	Belum seluruh satuan kerja menyusun Manajemen Risiko	Rendahnya tingkat penerapan Manajemen Risiko Satuan Kerja	Risiko Operasional	Inspektorat Wilayah	Belum seluruh satuan kerja memahami penerapan Manajemen risiko sesuai permenkumham	eksternal	UC	dapat mempengaruhi tingkat maturitas SPIP terintegrasi	Kemen kumham	pendampingan penyusunan manajemen risiko satuan kerja oleh APIP	Rendahnya tingkat penerapan Manajemen Risiko Satuan Kerja
102	Persentase pemanfaatan penerapan manejemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja	Terjadinya fraud ataupun Operasi Tangkap tangan	Pengawasan tidak dapat mengidentifikasi terjadinya fraud dalam pelaksanaan Tusi satuan kerja dan kerugian negara dalam pelaksanaan Belanja Modal	Risiko Reputasi Risiko Kepatuhan	Inspektorat Wilayah	- Kurangnya informasi yang diperoleh auditor dan komunikasi dengan stakeholder; - Kurangnya kompetensi auditor; - Kurang tepatnya penerapan manajemen risiko satuan kerja	Internal	C	terjadi operasi tangkap tangan maupun kerugian negara	Kemen kumham	Audit Barjas, Audit kinerja tugas dan fungsi audit pengelolaan keuangan negara, audit sertijab	Pengawasan tidak dapat mengidentifikasi terjadinya fraud dalam pelaksanaan Tusi satuan kerja dan kerugian negara dalam pelaksanaan Belanja Modal
103	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara/ pengembalian ke kas negara dan terkait administrasi	Kurangnya respon satuan kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP terkait temuan pengembalian ke kas negara dan temuan administrasi	Temuan berulang	Risiko Keuangan dan Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN dan Inspektorat Wilayah	-Adanya temuan APIP yang berulang yang sifatnya administrasi, sehingga satker enggan menindaklanjti -adanya pergantian Kepala Satker sehingga tidak mengetahui adanya temuan dimaksuddan adanya temuan berulang	Internal dan Eksternal	C dan UC	Temuan hasil pengawasan itjen terus bertambah, dimungkikan satker tidak bisa ikut ajang WBK/WBBM	Kemen kumham	Rekosiliasi tindaklanjut temuan APIP secara berkala	Temuan berulang
104	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara dan terkait Administrasi	Kurangnya respon satuan kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terkait temuan Kerugian negara dan administrasi	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang tidak ditindaklanjuti semakin banyak	Risiko Keuangan dan Risiko Kepatuhan	Sekretariat ITJEN dan Inspektorat Wilayah	-Adanya temuan BPK terkait kerugian negara yang dilakukan oleh pihak ketiga yang sulit ditindaklanjuti -adanya temuan tahun yang telah lama namun belum ada kesepakatan antara ITJEN dengan BPK tentang prosesnya -Perbedaan data SIPTL dengan database ITJEN	Internal dan Eksternal	C dan UC	Meurunnya kinerja ITJEN dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan terkait kerugian negara	Kemen kumham	Rekosiliasi tindaklanjut temuan pemeriksaan BPK secara berkala melalui mekanisme SPITL	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang tidak ditindaklanjuti semakin banyak

Risk Event	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Krireria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
105	Presentase satuan kerja dilingkungan ITWIL I, II, III, Iv, V dan VI yang memperoleh predikat WBK/WBBM	Pemenuhan data dukung komponen pengungkit dan survei komponen hasil belum memadai	Potensi rata -rata Nilai komponen pengungkit dan komponen hasil WBK/WBBM tiap satker rendah	Risiko Operasional	Inspektorat Wilayah	Satuan kerja yang diusulkan belum memenuhi syarat yang telah ditetapkan	Internal	C	Satker yang diusulkan belum memperoleh predikat WBK/WBBM	Kemen kumham	-workshop pembangunan ZI -Pencanangan ZI -disusunnya Permenkumha no.6 th 2020 tentang perubahan permenkumham nno 29 th 2019 tentang pembangunan Zona Integritas -Disusunnya assesor	Potensi rata -rata Nilai komponen pengungkit dan komponen hasil WBK/WBBM tiap satker rendah
106	0 (Nol) kasus penyuapan yang terbukti di seluruh Itjen Kemenkumham	Belum seluruh proses kegiatan pada ITWIL telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyuapan beserta mitigasinya yang tepat	Potensi Auditor menerima Suap pada saat penyusunan Program audit	Risiko Kepatuhan	Inspektorat Wilayah	Kurangnya integritas Auditor	Internal	C	Penurunan Kredibilitas Itjen	Kemen kumham	Penandatanganan Pakta Integritas, Adanya SOP penyusunan Program Audit	-
107	0 (Nol) kasus penyuapan yang terbukti di seluruh Itjen Kemenkumham	Belum seluruh proses kegiatan pada ITWIL telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyuapan beserta mitigasinya yang tepat	Potensi Auditor menerima Suap pada saat penyusunan Program audit	sda	Inspektorat Wilayah	Kurangnya Pengawasan Berjenjang	Internal	C	Penurunan Kredibilitas Itjen	Kemen kumham	Penandatanganan Pakta Integritas, Adanya SOP penyusunan Program Audit	-
108	0 (Nol) kasus penyuapan yang terbukti di seluruh Itjen Kemenkumham	Belum seluruh proses kegiatan pada ITWIL telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyuapan beserta mitigasinya yang tepat	Potensi Auditor menerima Suap pada saat penyusunan Program audit	sda	Inspektorat Wilayah	Kurangnya Pemahaman Satker Terhadap Kebijakan Anti Suap di Inspektorat Jenderal	Eksternal	UC	Penurunan Kredibilitas Kemenkumham	Kemen kumham	Sosialisasi Penanganan Gratifikasi dan Pungutan Liar	-
109	0 (Nol) kasus penyuapan yang terbukti di seluruh Itjen Kemenkumham	Belum seluruh proses kegiatan pada ITWIL telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyuapan beserta mitigasinya yang tepat	Potensi Auditor menerima Suap dan fasilitas yang tidak wajar pada saat melakukan pengawasan (audit, reviu, evalausi, was lainnya)	Risiko Kepatuhan	Inspektorat Wilayah	Kurangnya integritas Auditor dalam melaksanakan tugas	Internal dan Eksternal	UC	Penurunan Kredibilitas Itjen	Kemen kumham	Internalisasi AAIPI Nomor KEP-063/AAIPI/DPR/2018 Tentang pedoman perilaku, Permenkumham Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Kumham, Kode Etik AAIPI nomor S-01/AAIPI/3/2014 tanggal 6 Maret 2014 serta Kode Etik APIP (Permenkumham 25 th 2022)	Potensi Auditor menerima Suap dan fasilitas yang tidak wajar pada saat melakukan pengawasan (audit, reviu, evalausi, was lainnya)
110	0 (Nol) kasus penyuapan yang terbukti di seluruh Itjen Kemenkumham	Belum seluruh proses kegiatan pada ITWIL telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyuapan beserta mitigasinya yang tepat	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan	Risiko Kepatuhan	Inspektorat Wilayah	Adanya dorongan untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari manipulasi laporan audit	Internal dan Eksternal	UC	Hasil Audit yang tidak objektif dan tidak dapat dipertanggung jawabkan	Kemen kumham	Internalisasi AAIPI Nomor KEP-063/AAIPI/DPR/2018 Tentang pedoman perilaku, Permenkumham Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Kumham, Kode Etik AAIPI nomor S-01/AAIPI/3/2014 tanggal 6 Maret 2014	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan

Risk Event	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Krireria	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
111	0 (Nol) kasus penyuapan yang terbukti di seluruh Itjen Kemenkumham	Belum seluruh proses kegiatan pada ITWIL telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyuapan beserta mitigasinya yang tepat	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disipilin untuk kepentingan pribadi atau golongan	Risiko Kepatuhan	Inspektorat Wilayah	Adanya dorongan untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari manipulasi laporan audit	Internal dan Eksternal	UC	Penjatuhan Hukuman disiplin yang tidak objektif	Kemen kumham	Penerapan PP No. 53 Tahun 2010, Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010, Permenkumham No. 28 Tahun 2019, UU ASN No. 5 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 17 Tahun 2020, Perka BKN No. 3 Tahun 2020, SOP	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disipilin untuk kepentingan pribadi atau golongan
112	0 (Nol) kasus penyuapan yang terbukti di seluruh Itjen Kemenkumham	Belum seluruh proses kegiatan pada ITWIL telah dilakukan identifikasi risiko terkait penyuapan beserta mitigasinya yang tepat	Potensi Auditor menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	Risiko Kepatuhan	Inspektorat Wilayah	Kurangnya integritas Auditor dalam melaksanakan tugas	Internal dan Eksternal	UC	Penurunan Kredibilitas Itjen	Kemen kumham	Internalisasi AAIPI Nomor KEP-063/AAIPI/DPR/2018 Tentang pedoman perilaku, Permenkumham Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Kumham, Kode Etik AAIPI nomor S-01/AAIPI /3/2014 tanggal 6 Maret 2014	Potensi Auditor menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan

Konsep hasil bahas di BUTTMKP bekasi dan masukan Itwil/Sekret Itjen

Risiko Kebijakan=	Risiko yang disebabkan kebijakan nasional, kebijakan anggaran, dan kebijakan internal yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan
Risiko Reputasi=	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif
Risiko Hukum=	Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum.
Risiko Keuangan=	Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja dan mengurangi nilai asset/ merugikan keuangan negara.
Risiko Operasional=	Risiko yang disebabkan oleh
Risiko Pelaporan=	Risiko yang disebabkan oleh ketidakandalan pelaporan dalam pengambilan keputusan internal dan ketidaksesuaian pelaporan dengan standar terkait.
Risiko Kepatuhan=	Risiko yang disebabkan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku

TAHAP-3
ANALISIS RISIKO
(PETA RISIKO)

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal
Nomor ITJ-03.OT.02.01 TAHUN 2023
Tanggal 24 Januari 2023

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Inspektorat Jenderal
Periode Penerapan : Tahun 2023

Konsep hasil bahas di BUTTMKP bekasi

Risk Event Number	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	**8**
1	Bertambahnya temuan BPK yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti Kemenkuham	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	**Orange / Tinggi**
2	Penguasaan BMN Kementerian Hukum dan HAM oleh pihak ketiga	Pasti	5	Kementerian	5	25	**Merah / Sangat Tinggi**
3	Indeks SPIP terintegrasi level 4 Kemenkumham sulit diperoleh	Moderat	3	Kementerian	5	15	**Kuning/sedang**
4	Tingkat Akuntabilitas Kinerja belum mencapai Nilai minimal "BB"	Moderat	3	Kementerian	5	15	**Kuning/sedang**
5	Nilai capaian RB belum mencapai Nilai minimal 35,5	Moderat	3	Kementerian	5	15	**Kuning/sedang**
6	Satuan Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM tidak sesuai dengan Target yang ditetapkan	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	**Orange / Tinggi**
7	Nilai Indeks Persepsi Integritas KEMENKUMHAM belum mencapai 80.2	Moderat	3	Kementerian	5	15	**Kuning/sedang**
8	perencanaan kegiatan audit yang tidak sesuai dengan standar	Kecil	2	Kementerian	5	10	Biru/Rendah
9	pelaporan hasil audit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	Kecil	2	Kementerian	5	10	Biru/Rendah
10	Kemungkinan risiko pending/gagal sertifikasi/sertifikasi dicabut	Kecil	2	Inspektorat Jenderal	4	8	Biru/Rendah
11	Potensi terjadinya bencana/musibah (Kebakaran. Pencurian dll)	Kecil	2	Inspektorat Jenderal	4	8	Biru/Rendah
12	UPP belum optimal memberikan rekomendasi kepada pimpinan	Moderat	3	Kementerian	5	15	**Kuning/sedang**
17	Manajemen Risiko ITJEN belum menjadi data early warning sytem	Hampir Pasti	4	Inspektorat Jenderal	4	16	**Orange / Tinggi**
18	Salah satu pihak kemitraan tidak bisa memenuhi kewajiban butir-butir MOU	Sangat Kecil	1	Inspektorat Jenderal	4	4	Hijau / Sangat Rendah
28	Pengembangan kompetensi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada jabatannya	Moderat	3	Kementerian	5	15	**Kuning/sedang**
42	Belum terpenuhinya kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan	pasti	4	Inspektorat Jenderal	4	16	**Orange / Tinggi**
48	SIMWAS/EMAWAS kurang optimal digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan putusan bagi pimpinan	Pasti	4	Inspektorat Jenderal	4	16	**Orange / Tinggi**
52	Data Hukuman Disiplin tidak update	Moderat	3	Kementerian	5	15	**Kuning/sedang**

Risk Event Number	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8
53	Data temuan tidak update	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning/sedang
57	Belum seluruh aset selesai dilakukan penetapan status pengguna (PSP)	Kecil	2	Inspektorat Jenderal	4	8	Biru/Rendah
63	Aset BMN hilang	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning/sedang
68	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di tahun berjalan	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning/sedang
69	salah saji dalam laporan keuangan itjen	Kecil	2	Kementerian	5	10	Biru/Rendah
71	Keterlambatan dalam menyampaikan Kontrak/ SPK yang telah ditandatangani	Kecil	2	Inspektorat Jenderal	4	8	Biru/Rendah
73	Pembebanan TGR yang belum diselesaikan	Sangat Kecil	1	Inspektorat Jenderal	4	4	Hijau/ Sangat Rendah
77	Uang persediaan tidak memenuhi kebutuhan	Hampir Pasti	4	Inspektorat Jenderal	4	16	Orange / Tinggi
88	Terdapat pengembalian uang perjalanan dinas LS	Hampir Pasti	4	Inspektorat Jenderal	4	16	Orange / Tinggi
92	menerima suap dari pegawai yang mengurus data kepegawaian.	Moderat	3	Inspektorat Jenderal	4	12	Kuning/sedang
93	terjadinya resiko diberikannya penilaian secara subjektif yang menguntungkan salah satu peserta pengadaan	Moderat	3	Inspektorat Jenderal	4	12	Kuning/sedang
94	menerima suap dari pegawai untuk mempercepat ketersediaan anggaran kegiatan	Kecil	2	Kementerian	5	10	Biru/Rendah
95	merubah/ menghilangkan data dalam server	Kecil	2	Kementerian	5	10	Biru/Rendah
96	menghilangkan database temuan pengawasan dan pemeriksaan	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning/sedang
97	pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	Moderat	3	Inspektorat Jenderal	4	12	Kuning/sedang
98	tidak memproses pengaduan	Kecil	2	Kementerian	5	10	Biru/Rendah
99	Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya memenuhi standar mutu KAPIP dan standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)	moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning/sedang
100	Satker yang berisiko tinggi belum teridentifikasi dalam PKPT	moderat	3	Inspektorat Jenderal	4	12	Kuning/sedang
101	Rendahnya tingkat penerapan Manajemen Risiko Satuan Kerja	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	Orange / Tinggi
102	Pengawasan tidak dapat mengidentifikasi terjadinya fraud dalam pelaksanaan Tusi satuan kerja dan kerugian negara dalam pelaksanaan Belanja Modal	Pasti	5	Kementerian	5	25	Merah / Sangat Tinggi
103	Temuan berulang	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning/sedang
104	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang tidak ditindaklanjuti semakin banyak	Pasti	5	Kementerian	5	25	Merah / Sangat Tinggi

Risk Event Number	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	**8**
105	Potensi rata -rata Nilai komponen pengungkit dan komponen hasil WBK/WBBM tiap satker rendah	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	**Orange / Tinggi**
109	Potensi Auditor menerima Suap dan fasilitas yang tidak wajar pada saat melakukan pengawasan (audit, reviu, evalausi, was lainnya)	Moderat	3	Kementerian	5	15	**Kuning/sedang**
110	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan	Moderat	3	Kementerian	5	15	**Kuning/sedang**
111	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disipilin untuk kepentingan pribadi atau golongan	Moderat	3	Kementerian	5	15	**Kuning/sedang**
112	Potensi Auditor menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	Kecil	2	Kementerian	5	10	Biru/Rendah

TAHAP-4
EVALUASI RISIKO
(PRIORITAS RISIKO DAN INDIKATOR RISIKO)

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal
Nomor ITJ-03.OT.02.01 TAHUN 2023
Tanggal 24 Januari 2023

Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Inspektorat Jenderal

INDIKATOR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Inspektorat Jenderal

Periode Penerapan : Tahun 2023

Konsep hasil bahas di BUTTMKP bekasi

Risk Event Number	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko		Indikator Risiko	
						Indikator Risiko Utama (IRU)	Batas Aman
1	2	3	4	5		6	7
2	Penguasaan BMN Kementerian Hukum dan HAM oleh pihak ketiga	25	1	20	(mengurangi kemungkinan)	Persentase BMN yang masih dikuasai oleh pihak ketiga	5,0%
102	Pengawasan tidak dapat mengidentifikasi terjadinya fraud dalam pelaksanaan Tusi satuan kerja dan kerugian negara dalam pelaksanaan Belanja Modal	25	2	20	(mengurangi kemungkinan)	Persentase APIP yang belum memperoleh pengembangan kompetensi terkait fraud, manajemen risiko dan kerugian negara dalam 2 tahun terakhir	50%
104	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang tidak ditindaklanjuti semakin banyak	25	3	20	(mengurangi kemungkinan)	Presentase temuan pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti	40%
1	Bertambahnya temuan BPK yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti Kemenkuham	20	4	15	(mengurangi kemungkinan)	Minimal nilai temuan BPK yang belum sesuai dan belum di tindaklanjuti dari seluruh/kumulatif total temuan	50,0%
101	Rendahnya tingkat penerapan Manajemen Risiko Satuan Kerja	20	5	15	(mengurangi kemungkinan)	Persentase satuan kerja yang belum menerapkan manajemen risiko	82%
6	Satuan Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM tidak sesuai dengan Target yang ditetapkan	20	6	15	(mengurangi kemungkinan)	Persentase satuan kerja yang memperoleh predikat WBK dan WBBM dari TPN	8%
105	Potensi rata -rata Nilai komponen pengungkit dan komponen hasil WBK/WBBM tiap satker rendah	20	7	15	(mengurangi kemungkinan)	Persentase satuan kerja yang TIDAK lolos penilaian desk audit oleh TPI	10%
17	Manajemen Risiko ITJEN belum menjadi data early warning sytem	16	8	12	(mengurangi kemungkinan)	Persentase realisasi kegiatan pengendalian risiko yang tidak dilaksanakan	10%
48	SIMWAS/EMAWAS kurang optimal digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan putusan bagi pimpinan	16	9	12	(mengurangi kemungkinan)	data Simwas dan dasboard pimpinan terupdate berkala tiap bulan	12
42	Belum terpenuhinya kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan	16	10	12	(mengurangi kemungkinan)	Persentase sistem informasi yang belum terpenuhi untuk menunjang pengawasan	14%
77	Uang persediaan tidak memenuhi kebutuhan	16	11	12	(mengurangi kemungkinan)	Persentase sisa anggaran LS yang tidak dapat dipergunakan kembali dari total DIPA Itjen	2%
88	Terdapat pengembalian uang perjalanan dinas LS	16	12	12	(mengurangi kemungkinan)	Persentase sisa anggaran LS yang tidak dapat dipergunakan kembali dari total DIPA Itjen	2%
103	Temuan berulang	15	13	12	(mengurangi kemungkinan)	Presentase temuan pengawasan yang belum ditindaklanjuti	40%
3	Indeks SPIP terintegrasi level 4 Kemenkumham sulit diperoleh	15	14	12	(mengurangi dampak)	Persentase rekomendasi penilaian maturitas SPIP Kemenkumham yang belum ditindaklanjuti	10,0%
4	Tingkat Akuntabilitas Kinerja belum mencapai Nilai minimal "BB"	15	15	12	(mengurangi dampak)	Persentase rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja Kemenkumham yang telah ditindaklanjuti	50,0%
5	Nilai capaian RB belum mencapai Nilai minimal 35,5	15	16	12	(mengurangi dampak)	Persentase rekomendasi evaluasi reformasi birokrasi Kemenkumham yang belum ditindaklanjuti	10,0%

Risk Event Number	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko		Indikator Risiko	
						Indikator Risiko Utama (IRU)	Batas Aman
1	2	3	4	5		6	7
7	Nilai Indeks Persepsi Integritas KEMENKUMHAM belum mencapai 80.2	15	17	12	(mengurangi kemungkinan)	Indeks integritas Kemenkumham, minimal 78 (hasil SPI-KPK)	78,00
99	Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya memenuhi standar mutu KAPIP dan standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)	15	18	10	(mengurangi kemungkinan)	Presentase penyusunan PKPT berbasis risiko yang belum dapat memanfaatkan data penerapan manajemen risiko satuan kerja	50%
109	Potensi Auditor menerima Suap dan fasilitas yang tidak wajar pada saat melakukan pengawasan (audit, reviu, evalausi, was lainnya)	15	19	10	(mengurangi kemungkinan)	Jumlah aduan Auditor yang terbukti menerima penyuapan yang terbukti pada Pelaksanaan Audit	0
110	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan	15	20	10	(mengurangi kemungkinan)	Jumlah aduan Auditor yang terbukti melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan	0
111	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disipilin untuk kepentingan pribadi atau golongan	15	21	10	(mengurangi kemungkinan)	Jumlah aduan Auditor yang terbukti melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disipilin untuk kepentingan pribadi atau golongan .	0
12	UPP belum optimal memberikan rekomendasi kepada pimpinan	15	22	12	(mengurangi dampak)	Persentase peningkatan kejadian kasus pungli/gratifikasi/korupsi yang terungkap dibandingkan tahun sebelumnya	o
28	Pengembangan kompetensi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada jabatannya	15	23	12	(mengurangi dampak)	Persentase diklat yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan	50%
52	Data Hukuman Disiplin tidak update	15	24	10	(mengurangi kemungkinan)	Persentase kesalahan rekap data hukuman disiplin untuk bahan pimpinan, yang tidak update	0%
53	Data temuan tidak update	15	25	10	(mengurangi kemungkinan)	Persentase jumlah temuan yang belum diinput dalam Simwas oleh auditor	20%
63	Aset BMN hilang	15	26	10	(mengurangi kemungkinan)	Persentase nilai aset BMN yang hilang dibanding dengan total nilai aset	0%
68	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di tahun berjalan	15	27	10	(mengurangi kemungkinan)	Persentase nilai belanja modal yang baru dilaksanakan pada bulan November tahun berjalan dibandingkan dengan total nilai belanja modal	2%
96	menghilangkan database temuan pengawasan dan pemeriksaan	15	28	10	(mengurangi kemungkinan)	jumlah kasus menghilangkan data base temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan	0
92	menerima suap dari pegawai yang mengurus data kepegawaian.	12	29	8	(mengurangi dampak)	Jumlah kasus menerima suap dari pegawai yang mengurus data kepegawaian	0
100	Satker yang berisiko tinggi belum teridentifikasi dalam PKPT	12	30	8	(mengurangi kemungkinan)	Persentase satker yang beresiko tinggi belum teridentifikasi dalam PKPT	5%
93	terjadinya resiko diberikannya penilaian secara subjektif yang menguntungkan salah satu peserta pengadaan	12	31	8	(mengurangi dampak)	Jumlah kasus menerima suap dalam pengadaan untuk menguntungkan salah satu peserta pengadaan	0
97	pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	12	32	8	(mengurangi kemungkinan)	jumlah kasus pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	0
8	perencanaan kegiatan audit yang tidak sesuai dengan standar	10	33	5	(mengurangi kemungkinan)	Jumlah aduan conflict of interest/penyuapan pada proses pelaksanaan kegiatan audit, yang terbukti	0
9	pelaporan hasil audit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	10	34	5	(mengurangi kemungkinan)	Jumlah laporan pegawai Itjen yang menerima gratifikasi/penyuapan yang terbukti	0
112	Potensi Auditor menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	10	35	5	(mengurangi kemungkinan)	Jumlah aduan Auditor yang terbukti menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	0
69	salah saji dalam laporan keuangan itjen	10	36	5	(mengurangi kemungkinan)	% salah saji dalam laporan keuangan Itjen	0%
95	merubah/ menghilangkan data dalam server	10	37	5	(mengurangi kemungkinan)	jumlah kaus menghilangkan data server	0

Risk Event Number	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko		Indikator Risiko	
						Indikator Risiko Utama (IRU)	Batas Aman
1	2	**3**	4	5		6	7
98	tidak memproses pengaduan	**10**	38	5	(mengurangi kemungkinan)	Jumlah pengaduan yang tidak diproses oleh ITJEN	0
10	Kemungkinan risiko pending/gagal sertifikasi/sertifikasi dicabut	**8**	39	4	(mengurangi kemungkinan)	Tidak dapat mempertahankan / dicabutnya sertifikasi ISO	0
11	Potensi terjadinya bencana/musibah (Kebakaran. Pencurian dll)	**8**	40	4	(mengurangi kemungkinan)	Persentase pegawai dan PPNPN Itjen yang terkena musibah/bencana	0
57	Belum seluruh aset selesai dilakukan penetapan status pengguna (PSP)	**8**	41	4	(mengurangi kemungkinan)	persettase aset BMN yang belum ada penetapan statusnya	0%
71	Keterlambatan dalam menyampaikan Kontrak/ SPK yang telah ditandatangani	**8**	42	4	(mengurangi kemungkinan)	Persentase Uang persediaan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan	5%
94	menerima suap dari pegawai untuk mempercepat ketersediaan anggaran kegiatan	**10**	43	4	(mengurangi kemungkinan)	jumlah kasus suap/gratifikasi untuk memepercepat ketersediaan anggaran kegiatan	0
18	Salah satu pihak kemitraan tidak bisa memenuhi kewajiban butir-butir MOU	**4**	44	2	(mengurangi kemungkinan)	Jumlah kejadian kerjasama/kemitraan yang dilanggar	0
73	Pembebanan TGR yang belum diselesaikan	**4**	45	2	(mengurangi dampak)	Persentase TGR yang belum di selesaikan Itjen dibandingtotal TGR BPK di Itjen	5%

TAHAP-5
PENANGANAN RISIKO
(RENCANA AKSI / RENCANA PENGENDALIAN)

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal
Nomor ITJ-03.OT.02.01 TAHUN 2023
Tanggal 24 Januari 2023
Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Inspektorat Jenderal

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Inspektorat jenderal

Periode Penerapan : 2023

Konsep hasil bahas di BUTTMKP bekasi

Risk Event Number	Risiko	Profil Risiko	Prioritas Risiko	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
				Risiko	Batas Aman			Output	Target			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Penguasaan BMN Kementerian Hukum dan HAM oleh pihak ketiga	25	1	Persentase BMN yang masih dikuasai oleh pihak ketiga	5%	Mengurangi Risiko	Berkoordinasi dengan Biro BMN dan Biro Hukum dan Kerja Sama terkait penertiban BMN yang dikuasai oleh pihak ketiga	Laporan hasil koordinasi	2	Juni dan Desember	Inspektorat Wilayah IV	-
102	Pengawasan tidak dapat mengidentifikasi terjadinya fraud dalam pelaksanaan Tusi satuan kerja dan kerugian negara dalam pelaksanaan Belanja Modal	25	2	Persentase APIP yang belum memperoleh pengembangan kompetensi terkait fraud, manajemen risiko dan kerugian negara dalam 2 tahun terakhir	50%	Mengurangi Risiko	Diklat terkait fraud dan/atau manajemen risiko dalam bentuk pelatihan , FGD, Workshop atau sertifikasi Kompeten	Laporan Diklat terkait fraud dan/atau manajemen risiko	1	Desember	Inspektorat wilayah	-
104	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang tidak ditindaklanjuti semakin banyak	25	3	Presentase temuan pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti	40%	Mengurangi Risiko	Menyusun Laporan kegiatan rekonsiliasi percepatan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	Laporan rekonsiliasi	4	Triwulan	Inspektorat wilayah dan Sekretariat Itjen (Humas dan SIP)	-
1	Bertambahnya temuan BPK yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti Kemenkuham	20	4	Minimal nilai temuan BPK yang belum sesuai dan belum di tindaklanjuti dari seluruh/kumulatif total temuan	50%	Mengurangi Risiko	Melakukan koordinasi dengan satuan kerja secara berkesinambungan	Laporan hasil koordinasi	1	Desember	Inspektorat Wilayah	-
101	Rendahnya tingkat penerapan Manajemen Risiko Satuan Kerja	20	5	Persentase satuan kerja yang belum menerapkan manajemen risiko	82%	Mengurangi Risiko	Evaluasi atas penerapan manajemen risiko pada satuan kerja	Laporan evaluasi	1	Desember	Inspektorat wilayah	-

6	Satuan Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM tidak sesuai dengan Target yang ditetapkan	20	6	Persentase satuan kerja yang memperoleh predikat WBK dan WBBM dari TPN	8%	Mengurangi Risiko	- Menetapkan Petunjuk Teknis pembangunan ZI di Lingkungan Kemenkumham Tahun 2023 - Melaksanakan Workshop/FGD	1. Pedoman Teknis Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kemenkumham yang diterbitkan oleh Inspektur Jenderal. 2. Petunjuk Teknis pembangunan ZI di Lingkungan Kemenkumham Tahun 2023 3.Laporan pelaksanaan Workshop/FGD terkait pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM 4. Laporan Hasil Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal terkait dengan Pembinaan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kemenkumham. 5. Laporan Hasil Evaluasi TPI yang melakukan pengujian apakah telah dilakukan roses penilian yang ketat dan selektif secara berjenjang oelh dari Kantor Wilayah dan Unit Eselon I Pembina. 6. Laporan Hasil Panel TPI	6	Januari sd Mei	Inspektorat Wilayah VI	-
105	Potensi rata -rata Nilai komponen pengungkit dan komponen hasil WBK/WBBM tiap satker rendah	20	7	Persentase satuan kerja yang TIDAK lolos penilaian desk audit oleh TPI	10%	Mengurangi Risiko	TPI Melaksanakan desk audit atas satuan kerja yang berpotensi dapat diusulkan WB/WBBM	Laporan hasil Desk Audit TPI	1	Juni	Inspektorat Wilayah (Tim TPI)	-
17	Manajemen Risiko ITJEN belum menjadi data early warning sytem	16	8	Persentase realisasi kegiatan pengendalian risiko yang tidak dilaksanakan	10%	Mengurangi Risiko	Pemantauan atas capaian rencana aksi dan pengendalian risiko ITEN	Laporan pemantauan mitigasi risiko	2	Juli dan desember tahun	Sekretaris ITJEN (Bagian PPL)	-
48	SIMWAS/EMAWAS kurang optimal digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan putusan bagi pimpinan	16	9	data Simwas dan dasboard pimpinan terupdate berkala tiap bulan	12	Mengurangi Risiko	Penyelesaian EMAWAS	Laporan penyelesaian EMAWAS	1	Oktober tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Humas dan SIP)	-
42	Belum terpenuhinya kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan	16	10	Persentase sistem informasi yang belum terpenuhi untuk menunjang pengawasan	14%	Mengurangi Risiko	Penyusunan Langkah Strategis Optimalisaisi Pengelolaan Teknologi Informasi	Dokumen Langkah Strategis Optimalisaisi Pengelolaan Teknologi Informasi	1	Desember tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Humas dan SIP)	-
77	Uang persediaan tidak memenuhi kebutuhan	16	11	Persentase sisa anggaran LS yang tidak dapat dipergunakan kembali dari total DIPA Itjen	2%	Mengurangi Risiko	Koordinasi ke ITWIL dan Sekretariat untuk membuat LS sesuai kebutuhan kegiatan	Laporan Koordinasi	1	Oktober	Sekretaris ITJEN Kelompok Substansi Keuangan)	-
88	Terdapat pengembalian uang perjalanan dinas LS	16	12	Persentase sisa anggaran LS yang tidak dapat dipergunakan kembali dari total DIPA Itjen	2%	Mengurangi Risiko	Koordinasi dengan ITWIL dan Sekretariat terkait nilai pengembalian uang perjalanan dinas	rekapitulasi Uang pengembalian perjalanan dinas	1	Oktober	Sekretaris ITJEN Kelompok Substansi Keuangan)	-
103	Temuan berulang	15	13	Presentase temuan pengawasan yang belum ditindaklanjuti	40%	Mengurangi Risiko	Menyusun Laporan kegiatan rekonsiliasi percepatan tindaklanjut temuan hasil pengawasan APIP	Laporan rekonsiliasi	4	Triwulan	Inspektorat wilayah dan Sekretariat Itjen (Humas dan SIP)	-
3	Indeks SPIP terintegrasi level 4 Kemenkumham sulit diperoleh	15	14	Persentase rekomendasi penilaian maturitas SPIP Kemenkumham yang belum ditindaklanjuti	10%	Mengurangi Risiko	monitoring penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi penilaian maturitas SPIP Kemenkumham	Laporan monitoring maturitas SPIP	1	April	Inspektorat Wilayah I	-
4	Tingkat Akuntabilitas Kinerja belum mencapai Nilai minimal "BB"	15	15	Persentase rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja Kemenkumham yang telah ditindaklanjuti	50%	Mengurangi Risiko	monitoring penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi penilaian SAKIP Kemenkumham	Laporan monitoring penilaian SAKIP	1	Juli	Inspektorat Wilayah V	-

5	Nilai capaian RB belum mencapai Nilai minimal 35,5	15	16	Persentase rekomendasi evaluasi reformasi birokrasi Kemenkumham yang belum ditindaklanjuti	10%	Mengurangi Risiko	monitoring penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi penilaian reformasi birokrasi Kemenkumham	Laporan monitoring penilaian RB	1	Juli	Inspektorat Wilayah II	-
7	Nilai Indeks Persepsi Integritas KEMENKUMHAM belum mencapai 80.2	15	17	Indeks integritas Kemenkumham, minimal 78 (hasil SPI-KPK)	7800%	Mengurangi Risiko	Mendorong Satgas Tunas Integritas / Agen Perubahan di setiap Kanwil Kemenkumham untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tunas Integritas/Agen Perubahan serta mengikuti Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi dari KPK. Dan / atau Sosialisasi Mekanisme Penilaian SPI-KPK ke Satuan kerja	Surat Edaran Inspektur Jenderal Laporan Sosialisasi	1 1	Juli September	Inspektorat Wilayah V Sekertariat ITJEN (Bagian PPL)	-
99	Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya memenuhi standar mutu KAPIP dan standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)	15	18	Presentase penyusunan PKPT berbasis risiko yang belum dapat memanfaatkan data penerapan manajemen risiko satuan kerja	50%	Mengurangi Risiko	Surat Edaran IRJEN tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan PKPT berbasis risiko	Surat Edaran IRJEN	1	Oktober	- Inspektorat Wilayah I - Bagian PPL	-
109	Potensi Auditor menerima Suap dan fasilitas yang tidak wajar pada saat melakukan pengawasan (audit, reviu, evalausi, was lainnya)	15	19	Jumlah aduan Auditor yang terbukti menerima penyuapan yang terbukti pada Pelaksanaan Audit	0%	Mengurangi Risiko	Melakukan sosialisasi/ internalisasi/bimbingan tentang kebijakan anti suap (ISO SMAP) dilingkungan masing-masing ITWIL	laporan Sosialisasi/internalisasi/ notula tentang giat anti suap	1	Desember	Inspektorat wilayah dan Sekretariat Itjen (Humas dan SIP)	-
110	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan	15	20	Jumlah aduan Auditor yang terbukti melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan	0%	Mengurangi Risiko	melakukan reviu berjenjang secara mendalam terkait Laporan Hasil Pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan Pengaawasan lainnya)	Dokumen reviu berjenjang atas LHP	12	Januari sd Desember	Inspektorat Wilayah	-
111	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disipilin untuk kepentingan pribadi atau golongan	15	21	Jumlah aduan Auditor yang terbukti melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disipilin untuk kepentingan pribadi atau golongan .	0%	Mengurangi Risiko	Melakukan reviu berjenjang atas usulan hukdis pegawai	Dokumen reviu berjenjang atas usulan hukdis	12	Januari sd Desember	Inspektorat Wilayah	-
12	UPP belum optimal memberikan rekomendasi kepada pimpinan	15	22	Persentase peningkatan kejadian kasus pungli/gratifikasi/korupsi yang terungkap dibandingkan tahun sebelumnya	o	Mengurangi Risiko	Penguatan UPP Satuan Kerja	laporan penguatan	1	Oktober	Sekretaris ITJEN (Humas dan SIP)	
28	Pengembangan kompetensi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada jabatannya	15	23	Persentase diklat yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan	50%	Mengurangi Risiko	Analisis gap (Kesenjangan) Kompetensi berdasarkan hasil uji kompetensi pegawai	Laporan Analisis gap (Kesenjangan) Kompetensi	2	Juli dan desember tahun berjalan	Sekretaris ITJEN (Kepegawaian)	-
52	Data Hukuman Disiplin tidak update	15	24	Persentase kesalahan rekap data hukuman disiplin untuk bahan pimpinan, yang tidak update	0%	Mengurangi Risiko	Rekon data Hukuman disiplin dengan Auditor, Unit Utama, Kanwil dan Biro Kepegawaian	Laporan Kegiatan Rekonsiliasi Data Hukuman Disiplin	4	Triwulan	Sekretaris ITJEN (Humas dan SIP)	-
53	Data temuan tidak update	15	25	Persentase jumlah temuan yang belum diinput dalam Simwas oleh auditor	20%	Mengurangi Risiko	Rekonsiliasi data temuan dan Tindak Lanjut Pengawasan Internal dan Pemeriksaan Eksternal dengan Inspektorat Wilayah	Berita Acara Rekonsiliasi Data	12	Bulan	Sekretaris ITJEN (Humas dan SIP)	-

63	Aset BMN hilang	15	26	Persentase nilai aset BMN yang hilang dibanding dengan total nilai aset	0%	Mengurangi Risiko	Rekon pertangungjawaban keuangan dengan ITWIL dan Bagian	Laporan Rekon BMN	4	Triwulan	Sekretaris ITJEN (Bagian Umum)	-
68	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di tahun berjalan	15	27	Persentase nilai belanja modal yang baru dilaksanakan pada bulan November tahun berjalan dibandingkan dengan total nilai belanja modal	2%	Mengurangi Risiko	Percepatan Belanja Modal	Laporan belanja Modal	4	Triwulan	Sekretaris ITJEN (Bagian Umum)	-
96	menghilangkan database temuan pengawasan dan pemeriksaan	15	28	jumlah kasus menghilangkan data base temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan	0%	Mengurangi Risiko	Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentinggan Kelompok Substansi Kepegawaian	Dokumen Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentinggan Kelompok Substansi Kepegawaian	1	Maret	Sekretaris ITJEN Kelompok Substansi Kepegawaian	-
92	menerima suap dari pegawai yang mengurus data kepegawaian.	12	29	Jumlah kasus menerima suap dari pegawai yang mengurus data kepegawaian	0%	Mengurangi Risiko	Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentinggan Bagian Umum, PPK, dan Pejabat Pengadaan	Dokumen Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentinggan Bagian Umum, PPK, dan Pejabat Pengadaan	1	Maret	Sekretaris ITJEN Bagian Umum, PPK, dan Pejabat Pengadaan	-
100	Satker yang berisiko tinggi belum teridentifikasi dalam PKPT	12	30	Persentase satker yang beresiko tinggi belum teridentifikasi dalam PKPT	5%	Mengurangi Risiko	Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentinggan Kelompok Substansi Humas dan SIP	Dokumen Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentinggan Kelompok Substansi Humas dan SIP	1	Maret	Sekretaris ITJEN Kelompok Substansi Kelompok Substansi Humas dan SIP	-
93	terjadinya resiko diberikannya penilaian secara subjektif yang menguntungkan salah satu peserta pengadaan	12	31	Jumlah kasus menerima suap dalam pengadaan untuk menguntungkan salah satu peserta pengadaan	0%	Mengurangi Risiko	Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentinggan Kelompok Substansi Humas dan SIP	Dokumen Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentinggan Kelompok Substansi Humas dan SIP	1	Maret	Sekretaris ITJEN Kelompok Substansi Kelompok Substansi Humas dan SIP	-
97	pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	12	32	jumlah kasus pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	0%	Mengurangi Risiko	Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentinggan Kelompok Substansi Humas dan SIP	Dokumen Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentinggan Kelompok Substansi Humas dan SIP	1	Maret	Sekretaris ITJEN Kelompok Substansi Kelompok Substansi Humas dan SIP	-
8	perencanaan kegiatan audit yang tidak sesuai dengan standar	10	33	Jumlah aduan conflict of interest/penyuapan pada proses pelaksanaan kegiatan audit, yang terbukti	0%	Mengurangi Risiko	Monitoring aduan secara berkala	Laporan pengaduan berkala	1	Oktober	ITJEN	-
9	pelaporan hasil audit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	10	34	Jumlah laporan pegawai Itjen yang menerima gratifikasi/penyuapan yang terbukti	0%							

112	Potensi Auditor menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	10	35	Jumlah aduan Auditor yang terbukti menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	0%	
69	salah saji dalam laporan keuangan itjen	10	36	% salah saji dalam laporan keuangan Itjen	0%	**- untuk risiko no.7 sd 10 masuk dalam dalam katagori rendah dan sangat rendah (hijau dan biru)** **- maka tidak perlu dilakukan penanganan, dikarenakan berada dalam batas toleransi risiko** **- sehingga anggaran difokuskan untuk melakukan penaganan risikoyang berada pada profil sedang , tinggi dan sangata tinggi (kuning, orange dan merah)** **- namun demikian atas risiko hijau dan biru tetap dilakukan pemantauan secara berkala untuk mneghindari profil risiko menjadi sedang, tinggi bahkan sangat tinggi**
95	merubah/ menghilangkan data dalam server	10	37	jumlah kaus menghilangkan data server	0%	
98	tidak memproses pengaduan	10	38	Jumlah pengaduan yang tidak diproses oleh ITJEN	0%	
10	Kemungkinan risiko pending/gagal sertifikasi/sertifikasi dicabut	8	39	Tidak dapat mempertahankan / dicabutnya sertifikasi ISO	0%	
11	Potensi terjadinya bencana/musibah (Kebakaran. Pencurian dll)	8	40	Persentase pegawai dan PPNPN Itjen yang terkena musibah/bencana	0%	
57	Belum seluruh aset selesai dilakukan penetapan status pengguna (PSP)	8	41	persettase aset BMN yang belum ada penetapan statusnya	0%	
71	Keterlambatan dalam menyampaikan Kontrak/ SPK yang telah ditandatangani	8	42	Persentase Uang persediaan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan	5%	
94	menerima suap dari pegawai untuk mempercepat ketersediaan anggaran kegiatan	10	43	jumlah kasus suap/gratifikasi untuk memepercepat ketersediaan anggaran kegiatan	0%	
18	Salah satu pihak kemitraan tidak bisa memenuhi kewajiban butir-butir MOU	4	44	Jumlah kejadian kerjasama/kemitraan yang dilanggar	0%	**- untuk risiko no.7 sd 10 masuk dalam dalam katagori rendah dan sangat rendah (hijau dan biru)** **- maka tidak perlu dilakukan penanganan, dikarenakan berada dalam batas toleransi risiko** **- sehingga anggaran difokuskan untuk melakukan penaganan risikoyang berada pada profil sedang , tinggi dan sangata tinggi (kuning, orange dan merah)** **- namun demikian atas risiko hijau dan biru tetap dilakukan pemantauan secara berkala untuk mneghindari profil risiko men jadi sedang, tinggi bahkan sangat tinggi**
73	Pembebanan TGR yang belum diselesaikan	4	45	Persentase TGR yang belum di selesaikan Itjen dibandingtotal TGR BPK di Itjen	5%	

TAHAP-6
PEMANTAUAN RISIKO
(RENCANA AKSI / REALISASI CAPAIAN INDIKATOR RISIKO DAN REALISASI PENGENDALIAN) SERTA RISIKO RISIDUAL

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal
Nomor ITJ-03.OT.02.01 TAHUN 2023
Tanggal 24 Januari 2023
Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Inspektorat Jenderal

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko **: Inspektorat jenderal**

Periode Penerapan **: 2023**

Konsep hasil bahas di BUTTMKP bekasi

Risk Event Number	Risiko	Prioritas Risk	Tingkat Risk	Toleransi Risk	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
						Output	Target	Realisasi	%	Indikator Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6=(5/4) x100	7	8	9 (6 x 8) capaian indikator pengendalian x batas aman	10= (9/8)x100	11= kolom 10 x toleransi risiko (kolom 5 form evaluasi risiko)	12
2	Penguasaan BMN Kementerian Hukum dan HAM oleh pihak ketiga	1	25	20	Berkoordinasi dengan Biro BMN dan Biro Hukum dan Kerja Sama terkait penertiban BMN yang dikuasai oleh pihak ketiga	Laporan hasil koordinasi	2			Persentase BMN yang masih dikuasai oleh pihak ketiga	5%				
102	Pengawasan tidak dapat mengidentifikasi terjadinya fraud dalam pelaksanaan Tusi satuan kerja dan kerugian negara dalam pelaksanaan Belanja Modal	2	25	20	Diklat terkait fraud dan/atau manajemen risiko dalam bentuk pelatihan , FGD, Workshop atau sertifikasi Kompeten	Laporan Diklat terkait fraud dan/atau manajemen risiko	1			Persentase APIP yang belum memperoleh pengembangan kompetensi terkait fraud, manajemen risiko dan kerugian negara dalam 2 tahun terakhir	50%				
104	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang tidak ditindaklanjuti semakin banyak	3	25	20	Menyusun Laporan kegiatan rekonsiliasi percepatan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	Laporan rekonsiliasi	4			Presentase temuan pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti	40%				
1	Bertambahnya temuan BPK yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti Kemenkuham	4	20	15	Melakukan koordinasi dengan satuan kerja secara berkesinambungan	Laporan hasil koordinasi	1			Minimal nilai temuan BPK yang belum sesuai dan belum di tindaklanjuti dari seluruh/kumulatif total temuan	50%				

Risk Event Number	Risiko	Prioritas Risk	Tingkat Risk	Toleransi Risk	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
						Output	Target	Realisasi	%	Indikator Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6=(5/4) x100	7	8	9 (6 x 8) capaian indikator pengendalian x batas aman	10= (9/8)x100	11= kolom 10 x toleransi risiko (kolom 5 form evaluasi risiko)	12
101	Rendahnya tingkat penerapan Manajemen Risiko Satuan Kerja	5	20	15	Evaluasi atas penerapan manajemen risiko pada satuan kerja	Laporan evaluasi	1			Persentase satuan kerja yang belum menerapkan manajemen risiko	82%				
6	Satuan Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM tidak sesuai dengan Target yang ditetapkan	6	20	15	- Menetapkan Petunjuk Teknis pembangunan ZI di Lingkungan Kemenkumham Tahun 2023 - Melaksanakan Workshop/FGD	1. Pedoman Teknis Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan	6			Persentase satuan kerja yang memperoleh predikat WBK dan WBBM dari TPN	8%				
105	Potensi rata -rata Nilai komponen pengungkit dan komponen hasil WBK/WBBM tiap satker rendah	7	20	15	TPI Melaksanakan desk audit atas satuan kerja yang berpotensi dapat diusulkan WBK/WBBM	Laporan hasil Desk Audit TPI	1			Persentase satuan kerja yang TIDAK lolos penilaian desk audit oleh TPI	10%				
17	Manajemen Risiko ITJEN belum menjadi data early warning sytem	8	16	12	Pemantauan atas capaian rencana aksi dan pengendalian risiko ITEN	Laporan pemantauan mitigasi risiko	2			Persentase realisasi kegiatan pengendalian risiko yang tidak dilaksanakan	10%				
48	SIMWAS/EMAWAS kurang optimal digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan putusan bagi pimpinan	9	16	12	Penyelesaian EMAWAS	Laporan penyelesaian EMAWAS	1			data Simwas dan dasboard pimpinan terupdate berkala tiap bulan	1200%				
42	Belum terpenuhinya kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi yang menunjang proses bisnis pengawasan	10	16	12	Penyusunan Langkah Strategis Optimalisaisi Pengelolaan Teknologi Informasi	Dokumen Langkah Strategis Optimalisaisi Pengelolaan Teknologi Informasi	1			Persentase sistem informasi yang belum terpenuhi untuk menunjang pengawasan	14%				
77	Uang persediaan tidak memenuhi kebutuhan	11	16	12	Koordinasi ke ITWIL dan Sekretariat untuk membuat LS sesuai kebutuhan kegiatan	Laporan Koordinasi	1			Persentase sisa anggaran LS yang tidak dapat dipergunakan kembali dari total DIPA Itjen	2%				
88	Terdapat pengembalian uang perjalanan dinas LS	12	16	12	Koordinasi dengan ITWIL dan Sekretariat terkait nilai pengembalian uang perjalanan dinas	rekapitulasi Uang pengembalian perjalanan dinas	1			Persentase sisa anggaran LS yang tidak dapat dipergunakan kembali dari total DIPA Itjen	2%				

Risk Event Number	Risiko	Prioritas Risk	Tingkat Risk	Toleransi Risk	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
						Output	Target	Realisasi	%	Indikator Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6=(5/4) x100	7	8	9 (6 x 8) capaian indikator pengendalian x batas aman	10= (9/8)x100	11= kolom 10 x toleransi risiko (kolom 5 form evaluasi risiko)	12
103	Temuan berulang	13	15	12	Menyusun Laporan kegiatan rekonsiliasi percepatan tindaklanjut temuan hasil pengawasan APIP	Laporan rekonsiliasi	4			Presentase temuan pengawasan yang belum ditindaklanjuti	40%				
3	Indeks SPIP terintegrasi level 4 Kemenkumham sulit diperoleh	14	15	12	monitoring penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi penilaian maturitas SPIP Kemenkumham	Laporan monitoring maturitas SPIP	1			Persentase rekomendasi penilaian maturitas SPIP Kemenkumham yang belum ditindaklanjuti	10%				
4	Tingkat Akuntabilitas Kinerja belum mencapai Nilai minimal "BB"	15	15	12	monitoring penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi penilaian SAKIP Kemenkumham	Laporan monitoring penilaian SAKIP	1			Persentase rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja Kemenkumham yang telah ditindaklanjuti	50%				
5	Nilai capaian RB belum mencapai Nilai minimal 35,5	16	15	12	monitoring penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi penilaian reformasi birokrasi Kemenkumham	Laporan monitoring penilaian RB	1			Persentase rekomendasi evaluasi reformasi birokrasi Kemenkumham yang belum ditindaklanjuti	10%				
7	Nilai Indeks Persepsi Integritas KEMENKUMHAM belum mencapai 80.2	17	15	12	Mendorong Satgas Tunas Integritas / Agen Perubahan di setiap Kanwil Kemenkumham untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tunas Integritas/Agen Perubahan serta mengikuti Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi dari KPK. Dan / atau Sosialisasi Mekanisme Penilaian SPI-KPK ke Satuan kerja	Surat Edaran Inspektur Jenderal Laporan Sosialisasi	1 1			Indeks integritas Kemenkumham, minimal 78 (hasil SPI-KPK)	78				

Risk Event Number	Risiko	Prioritas Risk	Tingkat Risk	Toleransi Risk	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
						Output	Target	Realisasi	%	Indikator Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6=(5/4) x100	7	8	9 (6 x 8) capaian indikator pengendalian x batas aman	10= (9/8)x100	11= kolom 10 x toleransi risiko (kolom 5 form evaluasi risiko)	12
99	Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya memenuhi standar mutu KAPIP dan standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)	18	15	10	Surat Edaran IRJEN tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan PKPT berbasis risiko	Surat Edaran IRJEN	1			Presentase penyusunan PKPT berbasis risiko yang belum dapat memanfaatkan data penerapan manajemen risiko satuan kerja	50%				
109	Potensi Auditor menerima Suap dan fasilitas yang tidak wajar pada saat melakukan pengawasan (audit, reviu, evalausi, was lainnya)	19	15	10	Melakukan sosialisasi/ internalisasi/bimbingan tentang kebijakan anti suap (ISO SMAP) dilingkungan masing-masing ITWIL	laporan Sosialisasi/internalisasi/ notula tentang giat anti suap	1			Jumlah aduan Auditor yang terbukti menerima penyuapan yang terbukti pada Pelaksanaan Audit	0%				
110	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan	20	15	10	melakukan reviu berjenjang secara mendalam terkait Laporan Hasil Pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan Pengaawasan lainnya)	Dokumen reviu berjenjang atas LHP	12			Jumlah aduan Auditor yang terbukti melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan	0%				
111	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disipilin untuk kepentingan pribadi atau golongan	21	15	10	Melakukan reviu berjenjang atas usulan hukdis pegawai	Dokumen reviu berjenjang atas usulan hukdis	12			Jumlah aduan Auditor yang terbukti melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disipilin untuk kepentingan pribadi atau golongan .	0%				
12	UPP belum optimal memberikan rekomendasi kepada pimpinan	22	15	12	Penguatan UPP Satuan Kerja	laporan penguatan	1			Persentase peningkatan kejadian kasus pungli/gratifikasi/korupsi yang terungkap dibandingkan tahun sebelumnya	o				

Risk Event Number	Risiko	Prioritas Risk	Tingkat Risk	Toleransi Risk	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
						Output	Target	Realisasi	%	Indikator Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6=(5/4) x100	7	8	9 (6 x 8) capaian indikator pengendalian x batas aman	10= (9/8)x100	11= kolom 10 x toleransi risiko (kolom 5 form evaluasi risiko)	12
28	Pengembangan kompetensi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada jabatannya	23	15	12	Analisis gap (Kesenjangan) Kompetensi berdasarkan hasil uji kompetensi pegawai	Laporan Analisis gap (Kesenjangan) Kompetensi	2			Persentase diklat yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan	50%				
52	Data Hukuman Disiplin tidak update	24	15	10	Rekon data Hukuman disiplin dengan Auditor, Unit Utama, Kanwil dan Biro Kepegawaian	Laporan Kegiatan Rekonsiliasi Data Hukuman Disiplin	4			Persentase kesalahan rekap data hukuman disiplin untuk bahan pimpinan, yang tidak update	0%				
53	Data temuan tidak update	25	15	10	Rekonsiliasi data temuan dan Tindak Lanjut Pengawasan Internal dan Pemeriksaan Eksternal dengan Inspektorat Wilayah	Berita Acara Rekonsiliasi Data	12			Persentase jumlah temuan yang belum diinput dalam Simwas oleh auditor	20%				
63	Aset BMN hilang	26	15	10	Rekon pertangungjawaban keuangan dengan ITWIL dan Bagian	Laporan Rekon BMN	4			Persentase nilai aset BMN yang hilang dibanding dengan total nilai aset	0%				
68	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di tahun berjalan	27	15	10	Percepatan Belanja Modal	Laporan belanja Modal	4			Persentase nilai belanja modal yang baru dilaksanakan pada bulan November tahun berjalan dibandingkan dengan total nilai belanja modal	2%				
96	menghilangkan database temuan pengawasan dan pemeriksaan	28	15	10	Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentinggan Kelompok Substansi Kepegawaian	Dokumen Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentinggan Kelompok Substansi Kepegawaian	1			jumlah kasus menghilangkan data base temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan	0%				

Risk Event Number	Risiko	Prioritas Risk	Tingkat Risk	Toleransi Risk	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
						Output	Target	Realisasi	%	Indikator Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6=(5/4) x100	7	8	9 (6 x 8) capaian indikator pengendalian x batas aman	10= (9/8)x100	11= kolom 10 x toleransi risiko (kolom 5 form evaluasi risiko)	12
92	menerima suap dari pegawai yang mengurus data kepegawaian.	29	12	8	Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentinggan Bagian Umum, PPK, dan Pejabat Pengadaan	Dokumen Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentinggan Bagian Umum, PPK, dan Pejabat Pengadaan	1			Jumlah kasus menerima suap dari pegawai yang mengurus data kepegawaian	0%				
100	Satker yang berisiko tinggi belum teridentifikasi dalam PKPT	30	12	8	Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentinggan Kelompok Substansi Humas dan SIP	Dokumen Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentinggan Kelompok Substansi Humas dan SIP	1			Persentase satker yang beresiko tinggi belum teridentifikasi dalam PKPT	5%				
93	terjadinya resiko diberikannya penilaian secara subjektif yang menguntungkan salah satu peserta pengadaan	31	12	8	Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentinggan Kelompok Substansi Humas dan SIP	Dokumen Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentinggan Kelompok Substansi Humas dan SIP	1			Jumlah kasus menerima suap dalam pengadaan untuk menguntungkan salah satu peserta pengadaan	0%				
97	pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	32	12	8	Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentinggan Kelompok Substansi Humas dan SIP	Dokumen Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentinggan Kelompok Substansi Humas dan SIP	1			jumlah kasus pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	0%				
8	perencanaan kegiatan audit yang tidak sesuai dengan standar	33	10	5	Monitoring aduan secara berkala	Laporan pengaduan berkala	1			Jumlah aduan conflict of interest/penyuapan pada proses pelaksanaan kegiatan audit, yang terbukti	0%				

Risk Event Number	Risiko	Prioritas Risk	Tingkat Risk	Toleransi Risk	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
						Output	Target	Realisasi	%	Indikator Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6=(5/4) x100	7	8	9 (6 x 8) capaian indikator pengendalian x batas aman	10= (9/8)x100	11= kolom 10 x toleransi risiko (kolom 5 form evaluasi risiko)	12
9	pelaporan hasil audit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	34	10	5	Sosialisasi gratifikasi dan monitoring pelaporan gratifikasi	Laporan Sosialisasi dan monev gratifikasi	1			Jumlah laporan pegawai Itjen yang menerima gratifikasi/penyuapan yang terbukti	0%				
112	Potensi Auditor menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	35	10	5	Melakukan reviu berjenjang dalam menyusun telaahan aduan	Dokumen berjenjang dalam menyusun telaahan aduan	12			Jumlah aduan Auditor yang terbukti menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	0%				
69	salah saji dalam laporan keuangan itjen	36	10	5	Pelatihan Penyusunan laporan keuangan dan/atau materi pengelolaan keuangan	Laporan pelatihan/diklat/bimtek/workshop terkait pengelolaan keuangan dan/atau penyusunan laporan keuangan	1			% salah saji dalam laporan keuangan Itjen	0%				
95	merubah/ menghilangkan data dalam server	37	10	5	Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentinggan Kelompok Substansi Humas dan SIP	Dokumen Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentinggan Kelompok Substansi Humas dan SIP	1			jumlah kaus menghilangkan data server	0%				
98	tidak memproses pengaduan	38	10	5	Rekon Pengaduan	Laporan rekon Pengaduan	4			Jumlah pengaduan yang tidak diproses oleh ITJEN	0%				
10	Kemungkinan risiko pending/gagal sertifikasi/sertifikasi dicabut	39	8	4	Audit eksternal oleh lembaga sertifikasi ISO SMAP	Sertifikasi ISO SMAP	1			Tidak dapat mempertahankan / dicabutnya sertifikasi ISO	0%				

Risk Event Number	Risiko	Prioritas Risk	Tingkat Risk	Toleransi Risk	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
						Output	Target	Realisasi	%	Indikator Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6=(5/4) x100	7	8	9 (6 x 8) capaian indikator pengendalian x batas aman	10= (9/8)x100	11= kolom 10 x toleransi risiko (kolom 5 form evaluasi risiko)	12
11	Potensi terjadinya bencana/musibah (Kebakaran. Pencurian dll)	40	8	4	Meningkatkan tidak disiiplin keselamatan kerja	Laporan penanganan bencana	4			Persentase pegawai dan PPNPN Itjen yang terkena musibah/bencana	0%				
57	Belum seluruh aset selesai dilakukan penetapan status pengguna (PSP)	41	8	4	rekon data BMN dengan data invetaris per ruangan	Laporan Rekon data BMN	1			persettase aset BMN yang belum ada penetapan statusnya	0%				
71	Keterlambatan dalam menyampaikan Kontrak/ SPK yang telah ditandatangani	42	8	4	Rekon Data percepatan pertangungjawaban keuangan	Laporan rekon Keuangan	4			Persentase Uang persediaan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan	5%				
94	menerima suap dari pegawai untuk mempercepat ketersediaan anggaran kegiatan	43	10	4	Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentinggan Kelompok Substansi Keuangan	Dokumen Pakta Integritas dan Pernyataan tidak benturan Kepentinggan Kelompok Substansi keuangan	1			jumlah kasus suap/gratifikasi untuk memepercepat ketersediaan anggaran kegiatan	0%				
18	Salah satu pihak kemitraan tidak bisa memenuhi kewajiban butir-butir MOU	44	4	2	Penandatanagan MOU dan/atau PKS Kerjasama	Dokumen MOU dan/Atau PKS	1			Jumlah kejadian kerjasama/kemitraan yang dilanggar	0%				
73	Pembebanan TGR yang belum diselesaikan	45	4	2	Revisi angagran untuk optimalisasi	Dokumen Revisi	1			Persentase TGR yang belum di selesaikan Itjen dibandingtotal TGR BPK di Itjen	5%				

KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Sangat Kecil	Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	1
2	Kecil	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	2
3	Moderat	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	3
4	Hampir Pasti	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	4
5	Pasti	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	5

KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Individu	Berdampak terhadap Individu Pejabat/ Pegawai atau berkaitan dengan Risiko Kepatuhan	1
2	Satuan Kerja/ UPT	Berdampak terhadap Satuan Kerja/ UPT atau berkaitan dengan Risiko Pelaporan	2
3	Kantor Wilayah/ Unit Eselon II	Berdampak terhadap Kantor Wilayah atau berkaitan dengan Risiko Operasional	3
4	Unit Eselon I	Berdampak terhadap Unit Eselon I atau berkaitan dengan Risiko Keuangan dan Risiko Hukum	4
5	Kementerian	Berdampak terhadap Kementerian atau berkaitan dengan Risiko Reputasi dan Risiko Kebijakan	5

Range	Warna	Level Risiko	
21-25	MERAH	5	sangat tinggi
16-20	ORANGE	4	tinggi
11-15	KUNING	3	sedang
6-10	BIRU	2	rendah
1-5	HIJAU	1	sangat rendah

Matriks analisis terhadap tingkat Risiko (profil Risiko):

MATRIKSANALISIS RISIKO5X5			DAMPAK 1 PEGAWAI	2 SATKER/UPT	3 KANWIL/ESELO	4 UNIT UTAMA	5 KEMENTERI
KEMUNGKINAN	5	PASTI	5	10	15	20	25
	4	HAMPIR PASTI	4	8	12	16	20
	3	MODERAT	3	6	9	12	15
	2	KECIL	2	4	6	8	10
	1	SANGAT KECIL	1	2	3	4	5

Warna	Level	Level dimulaidari Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
Merah	5	21	Sangat Tinggi
Oranye	4	16	Tinggi
Kuning	3	11	Sedang
Biru	2	6	Rendah
Hijau	1	1	Sangat Rendah

Kegiatan Analisis Risiko menghasilkan Peta Risiko yang dituangkan dalam

KERTAS KERJA TREND RISIKO

SEMESTER I DAN SEMESTER II

TAHUN 2023

TREND RISIKO ATAS HASIL PEMANTAUAN PADA SEMESTER I DAN II TH.2023

Unit Pemilik Risiko = Inspektorat Jenderal
Periode Penerapan= 2023

Risk Event Number	Sisa Risiko	Prioritas Riisko	Profil Risiko	Toleransi Risiko	Risidual Risk Hasil Pemantauan Semester I	Keterangan Trend Risiko pada Semester I	Risidual Risk Hasil Pemantauan Semester II	Keterangan Trend Risiko pada Semester II
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Penguasaan BMN Kementerian Hukum dan HAM oleh pihak ketiga	1	25	20	0		0	
102	Pengawasan tidak dapat mengidentifikasi terjadinya fraud dalam pelaksanaan Tusi satuan kerja dan	2	25	20	0		0	
104	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang tidak ditindaklanjuti semakin banyak	3	25	20	0		0	
1	Bertambahnya temuan BPK yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti Kemenkuham	4	20	15	0		0	
101	Rendahnya tingkat penerapan Manajemen Risiko Satuan Kerja	5	20	15	0		0	
6	Satuan Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM tidak sesuai dengan Target yang ditetapkan	6	20	15	0		0	
105	Potensi rata -rata Nilai komponen pengungkit dan komponen hasil WBK/WBBM tiap satker rendah	7	20	15	0		0	
17	Manajemen Risiko ITJEN belum menjadi data early warning sytem	8	16	12	0		0	
48	SIMWAS/EMAWAS kurang optimal digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan putusan bagi pimpinan	9	16	12	0		0	
42	Belum terpenuhinya kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi yang menunjang proses bisnis	10	16	12	0		0	

Risk Event Number	Sisa Risiko	Prioritas Riisko	Profil Risiko	Toleransi Risiko	Risidual Risk Hasil Pemantauan Semester I	Keterangan Trend Risiko pada Semester I	Risidual Risk Hasil Pemantauan Semester II	Keterangan Trend Risiko pada Semester II
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	Uang persediaan tidak memenuhi kebutuhan	11	16	12	0		0	
88	Terdapat pengembalian uang perjalanan dinas LS	12	16	12	0		0	
103	Temuan berulang	13	15	12	0		0	
3	Indeks SPIP terintegrasi level 4 Kemenkumham sulit diperoleh	14	15	12	0		0	
4	Tingkat Akuntabilitas Kinerja belum mencapai Nilai minimal "BB"	15	15	12	0		0	
5	Nilai capaian RB belum mencapai Nilai minimal 35,5	16	15	12	0		0	
7	Nilai Indeks Persepsi Integritas KEMENKUMHAM belum mencapai 80.2	17	15	12	0		0	
99	Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya memenuhi standar mutu KAPIP dan standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)	18	15	10	0		0	
109	Potensi Auditor menerima Suap dan fasilitas yang tidak wajar pada saat melakukan pengawasan (audit, reviu, evalausi, was lainnya)	19	15	10	0		0	
110	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap hasil Audit untuk kepentingan pribadi atau golongan	20	15	10	0		0	
111	Potensi Auditor melakukan perubahan terhadap usulan hukuman disipilin untuk kepentingan pribadi atau golongan	21	15	10	0		0	
12	UPP belum optimal memberikan rekomendasi kepada pimpinan	22	15	12	0		0	

Risk Event Number	Sisa Risiko	Prioritas Riisko	Profil Risiko	Toleransi Risiko	Risidual Risk Hasil Pemantauan Semester I	Keterangan Trend Risiko pada Semester I	Risidual Risk Hasil Pemantauan Semester II	Keterangan Trend Risiko pada Semester II
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Pengembangan kompetensi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada jabatannya	23	15	12	0		0	
52	Data Hukuman Disiplin tidak update	24	15	10	0		0	
53	Data temuan tidak update	25	15	10	0		0	
63	Aset BMN hilang	26	15	10	0		0	
68	Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan di tahun berjalan	27	15	10	0		0	
96	menghilangkan database temuan pengawasan dan pemeriksaan	28	15	10	0		0	
92	menerima suap dari pegawai yang mengurus data kepegawaian.	29	12	8	0		0	
100	Satker yang berisiko tinggi belum teridentifikasi dalam PKPT	30	12	8	0		0	
93	terjadinya resiko diberikannya penilaian secara subjektif yang menguntungkan salah satu peserta pengadaan	31	12	8	0		0	
97	pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permintaan data cela, permintaan surat keterangan bebas temuan dan surat pemulihan hukuman disiplin pegawai	32	12	8	0		0	
8	perencanaan kegiatan audit yang tidak sesuai dengan standar	33	10	5	0		0	
9	pelaporan hasil audit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	34	10	5	0		0	

Risk Event Number	Sisa Risiko	Prioritas Riisko	Profil Risiko	Toleransi Risiko	Risidual Risk Hasil Pemantauan Semester I	Keterangan Trend Risiko pada Semester I	Risidual Risk Hasil Pemantauan Semester II	Keterangan Trend Risiko pada Semester II
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	Potensi Auditor menerima Suap yang mempengaruhi pendapat dan saran pada tanggapan/telaahan atas pengaduan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan golongan	35	10	5	0		0	
69	salah saji dalam laporan keuangan itjen	36	10	5	0		0	
95	merubah/ menghilangkan data dalam server	37	10	5	0		0	
98	tidak memproses pengaduan	38	10	5	0		0	
10	Kemungkinan risiko pending/gagal sertifikasi/sertifikasi dicabut	39	8	4	0		0	
11	Potensi terjadinya bencana/musibah (Kebakaran. Pencurian dll)	40	8	4	0		0	
57	Belum seluruh aset selesai dilakukan penetapan status pengguna (PSP)	41	8	4	0		0	
71	Keterlambatan dalam menyampaikan Kontrak/ SPK yang telah ditandatangani	42	8	4	0		0	
94	menerima suap dari pegawai untuk mempercepat ketersediaan anggaran kegiatan	43	10	4	0		0	
18	Salah satu pihak kemitraan tidak bisa memenuhi kewajiban butir-butir MOU	44	4	2	0		0	
73	Pembebanan TGR yang belum diselesaikan	45	4	2	0		0	

KEBERHASILAN PENGELOLAAN
MANAJEMEN RISIKO BERTUMPU PADA :
1. RISK CULTURE AWARENESS
2. HUMAN STRATEGY
3. LEADERSHIP COMMITMENT